

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Strategi Dedolarisasi BRICS Dalam Perdagangan Internasional

5.1.1. *Local Currency Settlement (LCS)*

Local Currency Settlement (LCS) adalah mekanisme transaksi lintas negara yang memungkinkan negara-negara untuk melakukan pembayaran dan penyelesaian perdagangan menggunakan mata uang lokal mereka sendiri, tanpa harus bergantung pada dolar AS sebagai mata uang perantara. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi biaya konversi mata uang, serta memperkuat stabilitas ekonomi negara terlibat.

Secara global, inisiatif LCS muncul sebagai respons terhadap dominasi dolar AS dalam sistem keuangan internasional. Dengan menggunakan mata uang lokal, negara-negara dapat menghindari biaya konversi ganda yang biasanya terjadi saat harus menukar mata uang lokal ke dolar AS dan sebaliknya. Hal ini juga berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar dolar AS yang dapat membantu negara-negara menjaga stabilitas ekonomi domestik mereka. Dengan menggunakan mata uang sendiri dalam perdagangan internasional, negara-negara dapat memiliki kontrol lebih besar terhadap kebijakan moneter mereka. LCS dapat membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk terlibat dalam perdagangan internasional tanpa harus bergantung pada mata uang asing. Inisiatif LCS ini juga sejalan dengan upaya negara-negara untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif, membangun dominasi negara-negara maju dalam sistem keuangan global.

BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) menjadi penggerak utama dalam mendorong penggunaan *Local Currency Settlement (LCS)* di tingkat global. BRICS secara aktif memperkuat perdagangan dan penyelesaian keuangan menggunakan mata uang lokal masing-masing, serta mengkaji kelayakan

infrastruktur penyelesaian lintas batas yang independen dari sistem berbasis dolar. Pendorong utama BRICS dalam LCS adalah keinginan yang kuat untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih seimbang dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dan krisis model keuangan dolar sentris. Negara-negara BRICS telah sepakat untuk memperkuat perdagangan dan penyelesaian keuangan dalam mata uang lokal, serta mengembangkan infrastruktur pembayaran dan lembaga keuangan multilateral baru seperti *New Development Bank* yang diharapkan menjadi alternatif bagi lembaga keuangan internasional tradisional.

Dalam praktiknya, negara-negara BRICS telah memulai perdagangan bilateral dengan mata uang masing-masing negara anggota. Dengan target 50% perdagangan intra-BRICS tanpa USD pada 2030. China telah menerapkan LCS dengan lebih dari 40 negara, termasuk Rusia, Pakistan, dan Argentina. Menurut data dari *People's Bank of China* di tahun 2024 tingkat penerapan LCS sebanyak 30% atau setara \$183.6 miliar perdagangan bilateral dari total perdagangan \$612 miliar antara China dengan BRICS yang dilakukan dalam yuan. India menerapkan LCS dengan Rusia, UAE, dan Malaysia, dengan catatan tingkat penerapan sebanyak 18% setara dengan \$12.8 miliar dari total perdagangan \$71.12 miliar yang dilakukan India-Rusia menggunakan rupee pada 2024 menurut *Reserve Bank of India* di tahun 2024. Rusia yang menjadi negara dengan hasil minyak terbesar ke-3 di dunia melakukan transaksi minyak dan gas dengan China, dengan tingkat penerapan sebanyak 65% setara \$123.5 miliar dari total \$190 miliar perdagangan antara Rusia-China menggunakan mata uang lokal. Menurut *Brazilian Central Bank*, 2023 Brazil melakukan kesepakatan LCS dengan Argentina dan China dengan tingkat penerapan sebanyak 10% atau \$15 miliar dari total perdagangan \$150 dolar antara Brazil-China dalam yuan. Negara pendiri BRICS terakhir, yaitu Afrika Selatan melakukan mitra LCS dengan China dan anggota BRICS lainnya dengan tingkat penerapan sebanyak 12% atau \$2.4 miliar dari total perdagangan bilateral \$20 miliar dalam rand berdasarkan data dari *South African Reserve Bank* pada 2024.

Bukan hanya BRICS, *Local Currency Settlement* (LCS) juga semakin populer sebagai alternatif transaksi non-USD, terutama di kalangan negara berkembang dan blok ekonomi seperti ASEAN, dan Timur Tengah. ASEAN menjadi salah satu kawasan paling aktif dalam mengembangkan LCS, dipicu oleh ketergantungan tinggi pada dolar AS dan upaya integrasi ekonomi regional. Indonesia sebagai satu anggota pelopor ASEAN menjalin LCS dengan Jepang (rupiah-yen), Thailand (rupiah-baht), dan Malaysia (rupiah-ringgit) dengan tingkat penerapan sebanyak 5-7% berkisar \$1,6-2,24 miliar dari total transaksi perdagangan bilateral sebanyak \$32 miliar menurut data Bank Indonesia tahun 2024. Sementara menurut BI Roadmap 2025, Bank Indonesia menargetkan 15% setara dengan \$71,7 miliar perdagangan non-USD pada 2025 terutama di sektor otomotif dan komoditas. Selain itu, negara tetangga Malaysia menjalin LCS dengan China (ringgit-yuan), Indonesia (ringgit-rupiah), dan Thailand (ringgit-baht) dengan tingkat penerapan sebanyak 25% setara dengan \$27.5 miliar dari total perdagangan bilateral sebanyak \$110 miliar antara Malaysia-China dalam yuan menurut data Bank Negara Malaysia di tahun 2024. Thailand juga menjalin LCS dengan China (baht-yuan) dan Jepang (baht-yen) dengan tingkat penerapan sebanyak 20% atau sebanyak \$27 miliar dari total transaksi regional sebanyak \$135 miliar menurut Bank Of Thailand tahun 2023.

Negara-negara lain yang ikut aktif dalam transaksi LCS diantaranya ada Turki, yang menjalin hubungan LCS dengan Rusia dan China dengan tingkat penerapan sebanyak 30% atau \$19.5 miliar dengan total perdagangan \$65 miliar antara Turki-Rusia tanpa USD pada 2024. Uni Emirat Arab (UEA) menjalin LCS dengan India, dan China dengan tingkat penerapan sebanyak 22% atau setara dengan \$18.6 miliar dari total perdagangan bilateral sebanyak \$84.5 miliar. Dan yang terakhir ada Argentina dengan jalinaaan LCS bersama Brazil, dan China dengan tingkat penerapan sebanyak 15% setara dengan \$4.5 miliar dari total perdaganagan \$ 30 miliar dengan BRICS. Sementara itu, total perdagangan LCS global sudah mencapai \$1,2 triliun atau sama dengan 8% dari total perdagangan dunia, dengan tingkat pertumbuhan LCS di BRICS sebanyak lebih dari 35%

selama 2023-2024 yang dipimpin oleh China dan Rusia, sementara penerapan LCS di ASEAN mencapai 12% perdagangan intra-ASEAN yang menggunakan mata uang lokal.

Untuk menerapkan kebijakan *Local Currency Settlement* (LCS), suatu negara harus memenuhi beberapa persyaratan utama, baik dari segi regulasi, infrastruktur perbankan, maupun kerja sama bilateral. Menurut halaman resmi Bank Indonesia, melalui Peraturan BI Nomor 22/12/PBI/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank, LCS hanya dapat diimplementasikan jika terdapat *Memorandum of Understanding* (MoU) antara otoritas keuangan kedua negara, seperti bank sentral atau kementerian keuangan. Misalnya, Indonesia telah menandatangani MoU dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan China untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Tanpa kesepakatan formal maka LCS tidak dapat dilakukan. Selain itu, negara juga harus memiliki bank yang ditunjuk sebagai ACCD untuk memfasilitasi transaksi LCS. Bank ACCD harus memiliki kriteria seperti kesehatan dan stabilitas finansial yang kuat, pengalaman dalam transaksi internasional terutama dengan negara mitra LCS, jaringan cabang yang luas di negara asal dan mitra. Contoh yang ada di Indonesia adalah Bank Mandiri, BNI, dan Bank ICBC, Indonesia ditunjuk sebagai ACCD untuk transaksi dengan China, Jepang, dan Malaysia.

Syarat selanjutnya, negara harus memiliki kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan LCS, termasuk Peraturan Bank Sentral, dan petunjuk operasional (*Operating Guidelines/OG*). Agar LCS berjalan dengan lancar, negara juga harus memiliki sistem kliring dan penyelesaian transaksi yang efisien antar-bank, akses pasar valuta asing (Forex) untuk memfasilitasi konversi langsung antar mata uang lokal tanpa perantara USD. Contohnya, Indonesia mengembangkan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) untuk transaksi lintas negara dengan Korea Selatan, yang mendukung adanya LCS. LCS biasanya diterapkan antara negara dengan hubungan perdagangan dan investasi yang kuat. Misalnya, Indonesia memprioritaskan LCS dengan Malaysia, Thailand, dan Jepang karena mereka

termasuk mitra dagang terbesar. Tanpa volume transaksi yang cukup, skema LCS akan kurang efektif.

Yuan sebagai mata uang paling dominan dalam transaksi LCS memegang sebanyak 28% dominasi LCS secara global dan 60% atau sebanyak \$575 miliar transaksi LCS dalam BRICS. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memperkuat peran yuan dalam perdagangan internasional, menandai langkah penting dalam internasionalisasi mata uangnya. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, tetapi juga meningkatkan pengaruh ekonominya di kancah global. Dengan meningkatnya pangsa pasar renminbi (RMB) dalam transaksi perdagangan dan keuangan di kancah internasional, menjadikan RMB tetap mempertahankan posisinya sebagai mata uang paling aktif kelima untuk pembayaran global berdasarkan nilai, dengan pangsa sebesar 3,71% pada September 2023. Secara keseluruhan, nilai pembayaran RMB meningkat sebesar 2,77% dibandingkan dengan Agustus 2023, sementara secara umum semua mata uang pembayaran menurun sebesar 3,96% (SWIFT, 2023).

Menurut data dari *SWIFT RMD Tracker* yang diterbitkan oleh (Brussels, 2016) menunjukkan bahwa pada Oktober 2016 sudah sebanyak 101 negara yang menggunakan RMB untuk pembayaran, persentase total nilai pembayaran menggunakan mata uang ini mencapai 12,9%, mengalami peningkatan hampir 2% sejak Oktober 2014 (11,2%). Laporan ini menunjukkan bahwa penggunaan RMB sebagai mata uang pembayaran internasional terus meningkat. Dari 101 negara tersebut, 57 negara kini menggunakan RMB untuk lebih dari 10% dari nilai pembayaran langsung mereka dengan China dan Hong Kong. Pelaksanaan dari kebijakan internasionalisasi RMB sebagai mata uang internasional mulai gencar dilakukan oleh pemerintah China sejak selesai terjadinya krisis pada tahun 2008 yang mengakibatkan terjadinya penurunan kredibilitas dolar sebagai penguasa dalam mata uang internasional. Pada Juli 2009 pemerintah China telah melakukan usaha melalui peluncuran *pilot project* yaitu dengan memulai penggunaan yuan pada aktivitas transaksi internasional oleh *People Bank of China* (PBoC),

transaksi tersebut dilakukan dalam lima wilayah utama Tiongkok yaitu, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai dan Dongguan (Nilmada Azmi et al., 2022).

Pilot project ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional dan pengeluaran aset. China mendorong penggunaan RMB dalam perdagangan internasional dengan memfasilitasi transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal. Ini berarti negara-negara yang berdagang dengan China dapat menggunakan RMB untuk membayar dan menerima barang dan jasa, bukan hanya dalam dolar AS. Langkah ini membantu mengurangi biaya konversi mata uang dan meningkatkan efisiensi dalam transaksi internasional. Penggunaan RMB dalam perdagangan komoditas seperti minyak, logam, dan produk pertanian telah tumbuh secara signifikan. Ini mencerminkan peningkatan keterlibatan RMB dalam perdagangan global dan pengurangan ketergantungan pada dolar AS.

Kerjasama energi antara perdagangan China dan Rusia terus tumbuh pesat pada kuartal pertama 2023, dengan peningkatan sebesar 38,7% dari tahun sebelumnya. Kerja sama di sektor energi menyumbang lebih dari 40% dari total perdagangan komoditas bilateral, memainkan peran penting dalam hubungan ekonomi kedua negara. Dengan semakin cepatnya penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi, diperkirakan total perdagangan bilateral akan melampaui ambang batas US\$200 miliar pada tahun ini. Total perdagangan bilateral pada kuartal pertama mencapai US\$53,85 miliar. Ekspor Tiongkok ke Rusia naik 47,1% secara tahunan menjadi US\$24,07 miliar, sementara impor dari Rusia meningkat 32,6% menjadi US\$29,77 miliar. Pada bulan Maret saja, total perdagangan bilateral mencapai US\$20,07 miliar, meningkat 77% dibandingkan tahun sebelumnya, percepatan dari 36,4% dalam dua bulan pertama tahun 2023.

Rusia dan Tiongkok kini melakukan sekitar 92 persen penyelesaian perdagangan mereka dalam rubel Rusia dan yuan Tiongkok. Sementara itu, perdagangan Tiongkok dengan Timur Tengah juga tumbuh dengan cepat, lebih dari tiga kali lipat selama dua dekade terakhir. Impornya dari kawasan itu tumbuh

3,7 kali lipat menjadi US\$ 217 miliar, sementara eksportnya melonjak 3,1 kali lipat menjadi US\$ 169 miliar antara tahun 2009 dan 2023. Arab Saudi, mitra dagang terbesar Tiongkok di Teluk telah melihat surplus perdagangannya dengan Tiongkok meningkat dari US\$ 5-10 miliar pada tahun 2015-2016 menjadi setinggi US\$ 20-40 miliar selama tiga tahun terakhir. Kemitraan tersebut semakin menguat seiring berakhirnya kesepakatan petrodolar AS dan kerajaan tersebut menyatakan keinginannya untuk membuka perdagangan minyak menggunakan yuan. Sebagai pemimpin de facto Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), dan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dengan Barat, perubahan yang dilakukan Arab Saudi telah mengilhami negara-negara regional lainnya untuk mengikuti langkah yang sama, yang menandakan adanya perubahan geopolitik dan ekonomi yang signifikan (Manini, 2024).



Gambar 5.1 Perdagangan China dengan Timur Tengah (S&P Global Ratings, 2023)

Pada akhir Juni 2022, *People's Bank of China* (PBoC) yang merupakan bank sentral China juga menandatangani perjanjian pengaturan baru tentang likuiditas yang disebut *Renminbi Liquidity Arrangement* yang bertujuan untuk memberikan dukungan likuiditas bagi bank sentral partisipan saat terjadi periode

volatilitas pasar di waktu yang akan datang. Perjanjian ini mencakup bank sentral milik beberapa negara di Asia Tenggara (Bank Indonesia, Central Bank of Malaysia, Monetary Authority of Singapore). Melalui siaran pers (Bank Indonesia, n.d.) Bank Indonesia (BI) dan *the People's Bank of China* (PBoC) sepakat memperbarui perjanjian bilateral pertukaran mata uang lokal atau *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Perjanjian ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur PBoC, Pan Gongsheng, dan mulai berlaku sejak 31 Januari 2025, perjanjian ini memungkinkan pertukaran mata uang lokal hingga senilai 400 miliar yuan atau setara dengan USD 55 miliar untuk mendorong perdagangan dan investasi bilateral tanpa menggunakan dolar AS. Negara-negara di atas juga memperbarui perjanjian dengan PBoC untuk mengurangi penggunaan dollar AS dalam *cross-border payments*. Diikuti dengan Thailand, Laos, Cambodia dan Myanmar, semua mengumumkan bahwa mereka berupaya untuk mengurangi penggunaan dolar AS sebagai *intermediary of cross-border payments*. Alasan untuk meninggalkan dolar AS ini tidak lain karena disebabkan oleh rasa khawatir mereka apabila terkena sanksi serupa dengan yang diperoleh Rusia pasca penyerangan Ukraina (Hasibuan et al., 2022).

5.1.2. New Development Bank (NDB)

Sejak didirikan, *New Development Bank* (NDB) telah mengalami transformasi yang signifikan, hingga menjadi salah satu penyedia utama solusi pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Perjalanan NDB senantiasa berlandaskan pada mandat utamanya, yang menjadi pedoman dalam setiap mengambil kebijakan, strategi, dan keputusan institusional yang diambil. Komitmen ini mencerminkan konsistensi NDB dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam praktik operasionalnya. Transformasi kelembagaan NDB tidak hanya tercermin dalam peningkatan kapasitas internal dan proyek-proyek pembangunan yang didanai, tetapi juga dalam perluasan keanggotaan. Pada tahun 2021, Dewan Gubernur NDB secara resmi menyetujui keanggotaan baru dari empat negara, yaitu Bangladesh, Uni Emirat Arab (UEA),

Mesir, dan Uruguay. Keputusan ini menandai babak baru dalam sejarah NDB sebagai lembaga keuangan multilateral yang berorientasi global. Masuknya negara-negara di luar blik BRICS menunjukkan bahwa visi dan misi NDB mendapatkan pengakuan internasional yang semakin luas.

Seiring dengan capaian yang telah diraih dan kepercayaan yang terus berkembang dari negara-negara anggota serta komunitas internasional, NDB tidak berhenti pada pencapaian yang ada. Lembaga ini terus mendorong dirinya untuk menjadi lebih adaptif terhadap tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan transisi energi. Semangat inovatif dan responsif terhadap tantangan inilah yang menjadi kunci keberlangsungan NDB dalam memainkan peran strategis di tataran global.

Ide untuk mendirikan bank ini diusulkan oleh India pada KTT BRICS ke-4 tahun 2012 yang diadakan di Delhi. Pendirian NDB secara resmi dituangkan dalam *Agreement on the New Development Bank* yang ditandatangani pada 15 Juli 2014 pada hari pertama KTT BRICS ke-6 yang diadakan di Fortaleza, Brasil dan mulai beroperasi pada 21 Juli 2015 dengan kantor pusat di Shanghai, China. Adapun NDB dibentuk dengan beberapa tujuan, diantaranya untuk mengisi kesenjangan pembiayaan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Dimana, pendirian ini adalah sebuah bentuk respon terhadap keterbatasan akses pembiayaan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut laporan dari strategi umum *New Development Bank* untuk tahun 2022-2026, diperkirakan terdapat kesenjangan pembiayaan infrastruktur hampir USD 12 triliun di negara-negara EMDC (*Emerging Markets and Developing Countries*) antara 2021-2030. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk melengkapi dan memperkuat upaya lembaga keuangan multilateral yang sudah ada dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan global, khususnya bagi negara-negara berkembang. Pendirian NDB ini juga dilandasi oleh keinginan untuk mempererat kerjasama ekonomi di antara negara-negara BRICS dan memberikan instrumen nyata untuk memperkuat posisi mereka dalam tatanan

ekonomi global. NDB juga memberikan dukungan melalui pinjaman, jaminan, partisipasi ekuitas, serta instrumen keuangan lainnya kepada proyek-proyek publik maupun swasta yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Selain pembiayaan, NDB juga berperan sebagai katalisator inovasi dan pertukaran pengetahuan antara anggota dan mitra, guna meningkatkan nilai tambah pembangunan dan adopsi praktik terbaik.

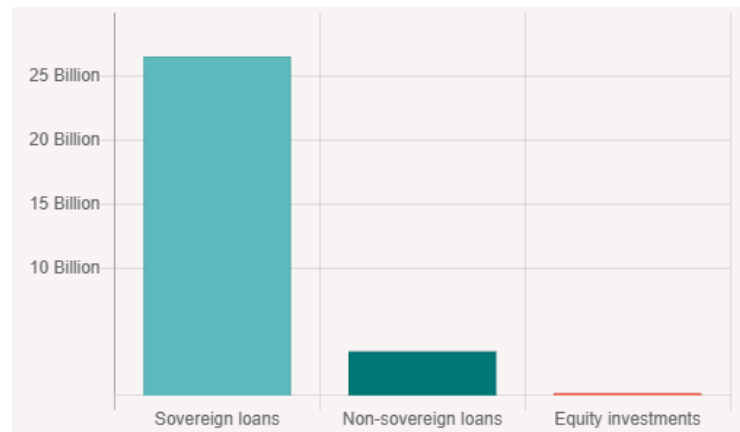
Hingga lima tahun pertama operasinya, NDB telah menyetujui 70 proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dengan nilai total USD 25,07 miliar di seluruh negara anggota. Dengan strategi 2022-2026, NDB menargetkan menjadi penyedia solusi utama untuk kebutuhan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di EMDCs, memperkuat kapasitas mobilisasi sumber daya, serta memperluas dampak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada saat pendirian NDB oleh BRICS, kondisi global ditandai oleh dominasi institusi keuangan barat seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*, serta ketergantungan tinggi pada dolar AS dalam sistem keuangan internasional. Krisis keuangan global 2008 memperlihatkan kerentanan sistem moneter berbasis dolar dan ketidaksetaraan dalam akses pembiayaan bagi negara berkembang. Negara-negara BRICS menilai bahwa sistem yang ada terlalu menguntungkan negara maju dan seringkali menempatkan negara berkembang pada posisi yang kurang menguntungkan, baik dari segi hak suara maupun akses terhadap sumber daya keuangan. Sebagai respons, BRICS mendirikan NDB pada 15 Juli 2014 dengan modal awal sebesar \$100 miliar dengan kontribusi masing-masing negara China (41 miliar), Brazil, Rusia, India (masing-masing 18 miliar), dan Afrika Selatan (5 miliar). Pada tahun 2021, Dewan Gubernur NDB menyetujui penerimaan Bangladesh, UEA, Mesir, dan Uruguay ke dalam keluarga NDB. Pangsa modal negara BRICS dipertahankan minimal 55% untuk menjaga kontrol. Hal ini yang menandai dimulainya ekspansi Bank sebagai lembaga multilateral global. Pendirian NDB juga merupakan upaya strategis untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam transaksi internasional dan memperkuat posisi tawar negara berkembang dalam sistem keuangan global. Salah satu target

NDB adalah meningkatkan proporsi pembiayaan dalam mata uang lokal hingga 30% dari total pembiayaan, sebagai langkah nyata mengurangi ketergantungan pada dolar.

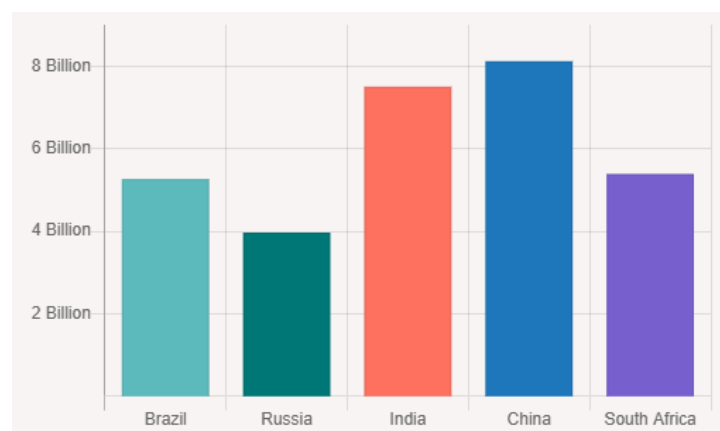
NDB secara konsisten menempatkan pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan sebagai prioritas utama yang memacu pemulihan hijau, dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif. Adapun berbagai proyek yang didukung oleh New Development Bank ini diantaranya adalah energi bersih dan efisiensi energi, infrastruktur transportasi, air dan sanitasi, perlindungan lingkungan, infrastruktur lingkungan, dan infrastruktur digital. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan komitmen NDB yaitu berdasarkan SDGs dan Perjanjian Paris, NDB memprioritaskan operasi berdampak tinggi yang cerdas terhadap iklim, tangguh terhadap bencana, terintegrasi dengan teknologi, dan inklusif secara sosial.

Menurut halaman resmi *New Development Bank*, Hingga 31 Desember 2024, jumlah total pembiayaan yang telah disetujui dalam USD yaitu sebesar 39 miliar dolar, dengan total proyek yang disetujui sebanyak 120 proyek. Adapun rincian dari proyek tersebut diantaranya adalah pembangunan jalan sepanjang 40.400 km, 35.000 pembangunan unit rumah, 1.400 km pembangunan terowongan atau kanal air, peningkatan kapasitas penyediaan air minum sebanyak 288.800 m³/hari, peningkatan kapasitas pengolahan limbah sebanyak 612.200 m³/hari, pembangunan 293 km jaringan angkutan kereta api perkotaan, pembangunan 43 sekolah, dan kapasitas penanganan penumpang udara akan ditingkatkan menjadi 104 juta/tahun. Dalam upaya pembangunan proyek-proyek ini, NDB juga berkomitmen untuk memperhatikan kepentingan lingkungan dengan upaya menghindari emisi karbon atau CO² sebanyak 14.7 juta ton/tahun, serta pembangunan kapasitas pembangkit energi terbarukan dan bersih sebanyak 2.400 MW. Beberapa portofolio dari proyek yang dijalankan oleh NDB (*New Development Bank*) diantaranya:



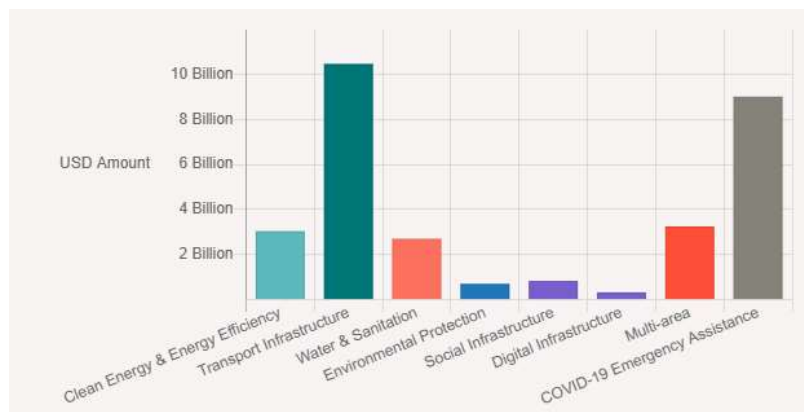
Gambar 5.2 Portofolio Proyek Berdasarkan Jenis Operasi

Statistik ini menunjukkan pembagian proyek berdasarkan siapa penerima dan pengelola dana pinjaman. *Sovereign* merupakan proyek yang dibiayai dan dijalankan oleh pemerintah atau lembaga negara. Biasanya proyek-proyek besar yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti pembangunan jalan, bendungan, atau pembangkit listrik. Sementara *Non-sovereign* merupakan proyek yang dibiayai untuk perusahaan swasta atau perusahaan milik negara, bukan langsung ke pemerintah. Biasanya untuk proyek-proyek yang lebih spesifik, seperti energi terbarukan oleh perusahaan listrik swasta. Terlihat bahwa lebih dari \$26.579 miliar dialokasikan untuk pembangunan proyek pemerintahan, lebih besar jika dibandingkan dengan proyek swasta dengan nilai dibawah \$3.451 miliar.



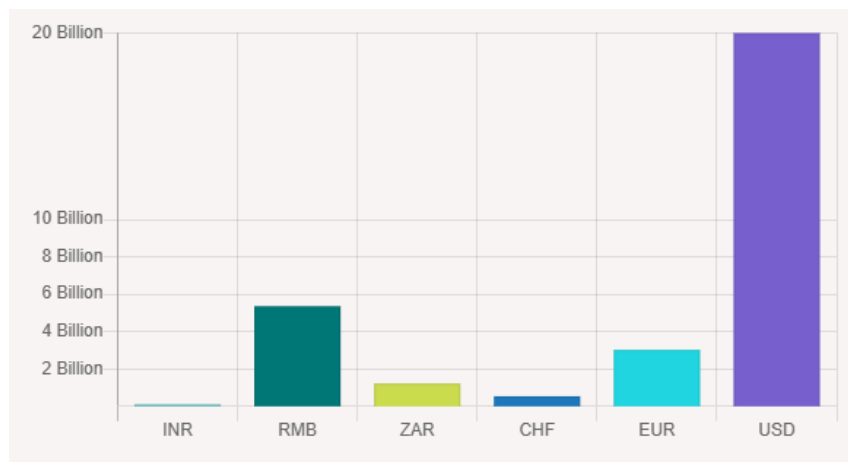
Gambar 5.3 Portofolio Proyek Berdasarkan Negara

Statistik ini memperlihatkan jumlah dan nilai proyek yang didanai NDB di setiap negara anggota terutama negara-negara BRICS. Dengan pembiayaan tertinggi terletak di China yaitu sebesar \$8.116 miliar, disusul dengan India sebesar \$7.5 miliar, Afrika Selatan sebesar \$5.386 miliar, Brazil \$5.262 miliar, dan yang terakhir yaitu Rusia dengan nilai \$3.966 miliar. Dengan mendanai proyek di berbagai negara anggota, NDB berupaya memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara.



Gammar 5.4 Portofolio Proyek Berdasarkan Area Operasi

Pada bagian ini, proyek-proyek dikelompokkan berdasarkan sektor atau bidang pembangunan, seperti infrastruktur transportasi sebesar \$10.479 miliar, energi bersih dan efisiensi energi sebesar \$3.026 miliar, air dan sanitasi sebesar \$2.684 miliar, perlindungan lingkungan sebesar \$680 miliar, infrastruktur sosial sebesar \$810 miliar, infrastruktur digital sebesar \$300 miliar, multi-area sebesar \$3.235 miliar, serta bantuan darurat Covid-19 sebesar \$9.016 miliar. Statistik ini memperlihatkan fokus NDB pada sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, proyek-proyek di bidang energi bersih membantu mengurangi emisi karbon, sementara proyek infrastruktur transportasi meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 5.5 Portofolio Proyek Berdasarkan Mata Uang

Statistik portofolio proyek berdasarkan mata uang menunjukkan dalam mata uang apa pembiayaan proyek dilakukan. NDB menyediakan pendanaan dalam berbagai mata uang, seperti Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), Renminbi China (RMB), dan mata uang lokal negara anggota lainnya. Mata uang tertinggi yang digunakan dalam pembiayaan proyek-proyek ini masih dipegang oleh dolar Amerika Serikat dengan nilai sebesar \$19.979 miliar, di susul dengan RMB China sebesar \$5.359 miliar, dan Euro Rusia sebesar \$3.025 miliar. Diversifikasi mata uang ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada negara penerima, meminimalisir risiko nilai tukar, serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi proyek di masing-masing negara.

Secara keseluruhan, statistik portofolio proyek NDB menggambarkan komitmen bank dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang dan pasar yang sedang tumbuh (EMDC), baik melalui pemerintah maupun sektor swasta, dengan pembiayaan yang fleksibel dan fokus pada sektor-sektor strategis.

5.1.3. *Contingent Reserves Arrangement (CRA)*

Contingent Reserves Arrangement (CRA) adalah sebuah mekanisme pendanaan yang dibentuk oleh negara-negara BRICS untuk memberikan dukungan likuiditas dan instrumen pencegahan bagi negara anggota yang

menghadapi tekanan likuiditas atau krisis ekonomi, khususnya tekanan pada neraca pembayaran jangka pendek. CRA berfungsi sebagai kerangka kerja yang memungkinkan negara anggota untuk saling membantu jika salah satu negara mengalami masalah keuangan akibat gejolak ekonomi global, seperti volatilitas mata uang atau kekurangan cadangan devisa.

BRICS membentuk *Contingent Reserve Arrangement* (CRA) sebagai respons terhadap ketergantungan negara-negara berkembang pada sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar AS dan lembaga seperti IMF. Salah satu tujuan utama CRA adalah mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan IMF, sehingga negara-negara anggota dapat lebih mandiri dalam menghadapi tekanan likuiditas global dan krisis keuangan. Pembentukan CRA bermula dari KTT BRICS ke 6 yang berlangsung di Fortaleza, Brazil, pada Juli 2014. Dalam pertemuan ini, para pemimpin BRICS menandatangani perjanjian pendirian CRA bersamaan dengan pendirian *New Development Bank* (NDB). Deklarasi Fortaleza menegaskan bahwa CRA akan memberikan efek pencegahan yang positif dan melengkapi sistem keuangan internasional yang sudah ada, bukan untuk menggantikannya secara langsung. Perjanjian CRA mulai berlaku setelah diratifikasi oleh semua anggota BRICS dan di umumkan pada KTT BRICS ke 7 pada Juli 2015.

Tujuan utama pembentukan CRA adalah untuk melindungi negara-negara anggota BRICS dari tekanan likuiditas global yang dapat mengancam stabilitas ekonomi mereka, terutama dalam situasi krisis keuangan internasional. CRA dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko eksternal, mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan internasional yang didominasi negara maju, serta memperkuat posisi ekonomi negara berkembang dalam sistem keuangan global. Dengan CRA, negara anggota dapat memperoleh akses cepat ke dana darurat melalui mekanisme swap mata uang, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak pasar global.

Dalam sistem keuangan internasional, CRA berperan sebagai jaring pengaman keuangan tambahan (*global financial safety net*) bagi negara-negara BRICS, yang selama ini sering menghadapi keterbatasan akses ke dana darurat dari lembaga seperti IMF. Dengan dana awal sebesar 100 miliar dolar AS, yang berasal dari kontribusi masing-masing negara anggota BRICS diantaranya ada China yang menyumbang sebanyak \$41 miliar, Brazil sebesar \$18 miliar, Rusia sebesar \$18 miliar, India sebesar \$18 miliar, Afrika Selatan sebesar \$5 miliar. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi tekanan likuiditas jangka pendek di negara anggota. CRA juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi Selatan-selatan, mengurangi dominasi dolar AS, serta mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional antar negara anggota. Dengan adanya CRA, bank sentral negara anggota dapat menyediakan likuiditas dalam mata uang asing kepada bank domestik selama krisis, sehingga mengurangi tekanan pada cadangan devisa dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan negara-negara BRICS dalam mengelola krisis keuangan.

Setiap negara anggota BRICS dalam *Contingent Reserve Arrangement* (CRA) memiliki batas maksimum yang dapat mereka pinjam berdasarkan kontribusi mereka. Dimana, China memiliki akses maksimum sebanyak \$21 miliar, Brazil sebesar \$18 miliar, Rusia sebesar \$18 miliar, India sebesar \$18 miliar, Afrika Selatan sebesar \$10 miliar. Meskipun memberikan kontribusi terbesar, China hanya dapat mengakses setengah dari jumlah yang disetorkan, sementara Afrika Selatan memiliki akses hingga dua kali lipat dari kontribusinya. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi negara-negara dengan ekonomi yang lebih kecil, seperti Afrika Selatan, agar dapat mengakses lebih banyak dana dalam situasi darurat. Sebaliknya, negara dengan ekonomi lebih besar seperti China memiliki batas akses yang lebih rendah dibandingkan kontribusinya, karena mereka memiliki cadangan devisa yang lebih besar dan lebih sedikit bergantung pada CRA untuk stabilitas keuangan mereka.

CRA sering dipandang sebagai pesaing atau alternatif bagi *International Monetary Fund* (IMF). Kedua lembaga ini memiliki fungsi serupa, yaitu

menyediakan bantuan keuangan kepada negara yang mengalami krisis. Namun, terdapat beberapa perbedaan utama:

1. CRA merupakan inisiatif regional yang hanya melibatkan negara-negara yang tergabung dengan BRICS, sedangkan IMF adalah lembaga global dengan keanggotaan hampir seluruh negara di dunia.
2. CRA lebih menekankan kerjasama antar negara berkembang dan bertujuan mengurangi ketergantungan pada negara maju serta dominasi dolar AS dalam sistem keuangan internasional.
3. CRA menggunakan mekanisme swap mata uang antar bank sentral anggota dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan tanpa intervensi kebijakan ekonomi yang berlebihan, sementara IMF menyediakan pinjaman dengan syarat-syarat tertentu yang sering kali dikritik sebagai syarat yang terlalu ketat bagi negara-negara berkembang.

Mekanisme akses dan pencairan dana dalam CRA dilakukan melalui sistem *currency swap*, dimana negara anggota yang membutuhkan likuiditas dapat mengajukan permintaan kepada negara lain dalam kelompok BRICS. Ketika suatu negara mengalami krisis keseimbangan pembayaran atau tekanan ekonomi, mereka dapat mengakses dana CRA dengan mengajukan permintaan kepada *Standing Committee*, yang bertanggung jawab atas pengelolaan CRA. Setelah permintaan disetujui, dana akan diberikan dalam bentuk swap mata uang, dimana negara peminjam akan menerima likuiditas dalam mata uang asing dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu.

Negara anggota yang ingin mengakses dana CRA harus memenuhi beberapa persyaratan utama. Diantaranya adalah:

1. Justifikasi ekonomi, dimana negara peminjam harus menunjukkan bahwa mereka mengalami tekanan ekonomi yang signifikan, seperti krisis keseimbangan pembayaran atau volatilitas pasar keuangan.
2. Batasan akses dana, dimana setiap negara anggota memiliki maksimum akses yang dapat mereka pinjam berdasarkan kontribusi mereka dalam CRA.

3. Tahap pencairan, negara dapat menarik hingga 30% dari kuota mereka tanpa harus memenuhi persyaratan IMF. Jika mereka membutuhkan lebih dari 30%, mereka harus memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh IMF, seperti reformasi atau kebijakan fiskal tertentu.

Hubungan antara *Contingent Reserve Arrangement* (CRA) dan *New Development Bank* (NDB) sangat erat, keduanya merupakan inisiatif utama BRICS dan dirancang sebagai instrumen pelengkap untuk memperkuat arsitektur keuangan negara-negara BRICS serta mendukung kemandirian ekonomi negara berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan sistem keuangan global yang selama ini didominasi oleh negara Barat. Sinergi antara CRA dan NDB tercermin dalam tujuan besar BRICS untuk membangun sistem keuangan global yang lebih inklusif dan adil. CRA memperkuat ketahanan moneter dan stabilitas keuangan, sedangkan NDB mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang melalui pembiayaan infrastruktur dan proyek strategis. Keduanya bersama-sama merepresentasikan dedikasi BRICS untuk menciptakan alternatif dan pelengkap terhadap sistem keuangan internasional yang ada, sekaligus memperkuat posisi tawar negara berkembang di kancah global.

Hambatan utama dalam implementasi CRA adalah masalah kepercayaan antara anggota. Negara-negara BRICS memiliki latar belakang ekonomi, politik, dan kepentingan nasional yang berbeda, sehingga membangun kepercayaan untuk saling mendukung dalam kondisi krisis menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, kredibilitas dan transparansi lembaga keuangan BRICS, termasuk CRA, masih menjadi perhatian. Contohnya, CRA tidak memiliki situs resmi yang berdiri sendiri seperti lembaga keuangan global lainnya seperti IMF dan *World Bank*. Informasi mengenai CRA biasanya tersedia melalui berbagai publikasi dari organisasi BRICS, pemerintah negara anggota, serta laporan ekonomi yang berkaitan dengan mekanisme stabilitas keuangan BRICS. Banyak negara dan pelaku pasar global masih meragukan akuntabilitas dan integritas institusi-institusi ini, sehingga menghambat perluasan penggunaan dan efektivitasnya.

Secara empiris, CRA belum pernah digunakan secara luas dalam merespons krisis keuangan berskala besar, sehingga efektivitasnya masih perlu diuji lebih lanjut. CRA memang dirancang sebagai jaring pengaman keuangan untuk menghadapi tekanan likuiditas jangka pendek, namun hingga saat ini belum ada catatan penggunaan CRA dalam skala besar pada krisis global atau regional. Salah satu alasan utamanya adalah keterbatasan likuiditas dan basis penggunaannya yang masih sempit dibandingkan dengan instrumen keuangan global seperti IMF dan dolar AS. Selain itu, koordinasi antar anggota dalam situasi darurat juga masih menjadi tantangan tersendiri, yang dapat mengurangi kecepatan dan efektivitas respon CRA. CRA perlu meningkatkan lagi kredibilitas, transparansi, dan kapasitasnya yang masih terbatas untuk menjadi alternatif nyata bagi IMF. Selain itu, harmonisasi kebijakan dan peningkatan kesiapan teknis antar anggota menjadi prasyarat penting agar CRA dapat berfungsi optimal sebagai jaring pengaman keuangan.

5.1.4. *Cross-border International Payment System (CIPS)*

Dalam upaya untuk merealisasikan aksi dedolarisasi, harus dilakukan opsi lain untuk beralih dari SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications*) dan menghindari *Western banks* serta *clearinghouses* milik Barat. SWIFT sendiri didirikan pada tahun 1970-an yang berpusat di Belgia, terbentuk oleh 239 bank dari 15 negara yang berkumpul untuk berdiskusi mengenai komunikasi pembayaran lintas negara. SWIFT menjadi infrastruktur keuangan global yang menjangkau setiap benua, lebih dari 200 negara dan wilayah, serta melayani lebih dari 11.000 lembaga di seluruh dunia (Swift, n.d.) SWIFT telah menjadi tulang punggung sistem keuangan global, memungkinkan transaksi internasional yang cepat, aman, dan efisien. Tanpa SWIFT, proses transfer dana antar negara akan jauh lebih rumit dan memakan waktu. Selain itu, SWIFT juga digunakan sebagai alat sanksi ekonomi, seperti yang terjadi pada Rusia pada tahun 2022.

Kemudian satu-satunya yang dapat menjadi alternatif dalam peralihan ini adalah dengan menciptakan jaringan komunikasi global lain yang dapat

menggantikan SWIFT lebih baik. Maka, China menghadirkan CIPS (*Cross-border International Payment System*) sebagai jawaban dari masalah ini. China memiliki bank besar yang aktif secara internasional, dan telah memiliki lembaga kliring-nya sendiri untuk melakukan transaksi lintas batas (*cross-border transactions*) serta China juga telah memulai kampanye untuk mendorong penggunaan mata uangnya secara internasional, yaitu renminbi (RMB).

Menurut halaman resmi CIPS, CIPS (*Cross-border Interbank Payment System*) adalah sistem pembayaran lintas batas yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi dalam mata uang Renminbi (RMB) secara efisien dan aman. Sistem ini dikembangkan oleh *People's Bank of China* (PBoC) pada tahun 2012 dan diluncurkan pada 8 Oktober 2015 sebagai bagian dari upaya China untuk menginternasionalkan penggunaan RMB dalam perdagangan dan investasi global. Dengan spesialisasi dalam kliring pembayaran lintas batas RMB, CIPS berupaya keras untuk menyediakan layanan kliring dan penyelesaian yang andal, efisien, nyaman, dan berbiaya rendah. Sebagai salah satu infrastruktur pasar keuangan (FMI) penting di Tiongkok, CIPS telah memainkan peran positif dalam berkontribusi pada pengembangan pusat keuangan internasional Shanghai, mempromosikan keterbukaan dua arah sektor keuangan, memperkuat dukungan keuangan bagi ekonomi sektor riil Tiongkok, melayani pembiayaan *Belt and Road Initiative* (BRI), dan memfasilitasi penggunaan RMB secara global. CIPS telah beroperasi secara stabil dengan ketersediaan 100% setelah peluncurannya. Skala peserta yang terus bertambah, volume transaksi yang terus meningkat, dan elaborasi progresif fungsi sistem terlihat jelas. Pada akhir tahun 2019, CIPS memiliki 33 Peserta Langsung dan 903 Peserta Tidak Langsung (dari 94 negara dan kawasan) dengan peningkatan masing-masing sebesar 74% dan 413% dibandingkan dengan tahun 2015. Melalui Peserta Langsung dan Tidak Langsung ini, jaringan CIPS telah menjangkau lebih dari 3000 lembaga perbankan di 167 negara dan kawasan.

Pada tahun 2023, CIPS memproses 6.6133 juta transaksi, dengan total nilai RMB 123.06 triliun (USD 17.09 triliun), meningkatkan 50,29% dalam

jumlah transaksi dan 27,27% dalam nilai transaksi dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga Maret 2025, CIPS memiliki 170 peserta langsung dan 1.497 peserta tidak langsung, mencakup 119 negara dan lebih dari 4.900 institusi perbankan. CIPS beroperasi dengan standar internasional, termasuk ISO 20022, yang memungkinkan penggunaan karakter China dalam transaksi serta meningkatkan interoperabilitas dengan sistem pembayaran global lainnya. Dengan semakin banyaknya negara yang bergabung dalam sistem ini, CIPS menjadi alternatif yang semakin kuat terhadap sistem pembayaran internasional yang didominasi oleh SWIFT. CIPS terus berkembang dengan peningkatan fitur dan jumlah peserta, menjadikannya salah satu elemen kunci dalam strategi keuangan China untuk memperkuat posisi RMB sebagai mata uang global.

CIPS dirancang untuk mendukung transaksi lintas batas yang lebih efisien, aman, dan mengurangi eksposur terhadap risiko geopolitik serta sanksi yang dapat dikenakan oleh AS melalui kontrol atas SWIFT. Penguatan CIPS ini menjadi salah satu kebijakan utama China dalam mendorong dedolarisasi, terutama setelah sanksi besar-besaran dijatuhkan pada Rusia pada 2022 lalu, yang memicu kekhawatiran negara-negara BRICS terhadap dominasi dolar AS dan potensi penggunaan sistem keuangan global sebagai alat politik. Upaya dedolarisasi melalui CIPS dan instrumen lainnya mulai menunjukkan hasil, tercermin dari penurunan porsi dolar AS dalam cadangan devisa global dari 71% pada tahun 2000 menjadi kurang dari 60% pada 2022. Namun, penggunaan yuan dalam cadangan devisa global masih jauh tertinggal dibandingkan dolar AS pada kuartal IV 2023, cadangan devisa RMB hanya sekitar 261.73 miliar USD, sementara dolar AS tetap mendominasi dengan lebih dari 6 triliun USD.

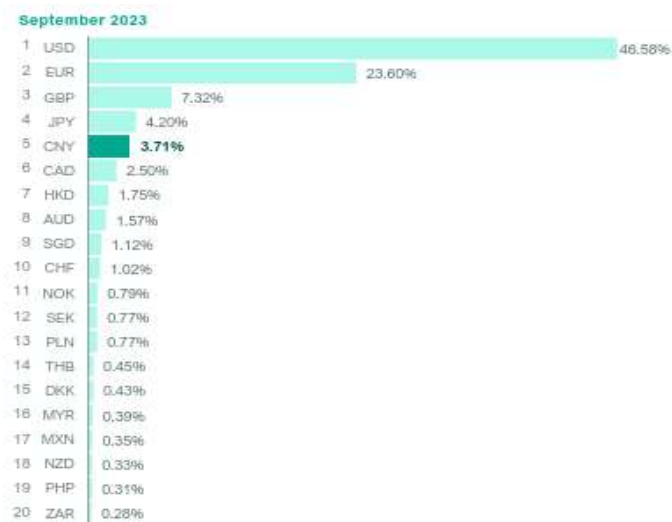
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) adalah jaringan global yang telah menjadi standar utama komunikasi keuangan internasional yang sudah dipercaya oleh seluruh negara sejak 1973. SWIFT digunakan oleh lebih dari 11.000 institusi di seluruh dunia untuk mengirimkan pesan keuangan yang aman, seperti instruksi pembayaran, konfirmasi transaksi, dan lain-lain. SWIFT sendiri bukan sistem transfer dana, melainkan sistem

pengiriman pesan yang menginstruksikan bank untuk memproses pembayaran. CIPS dan SWIFT memiliki perbedaan mendasar dalam cara mereka beroperasi. SWIFT adalah jaringan komunikasi keuangan global yang digunakan oleh bank dan institusi keuangan untuk mengirim pesan pembayaran, tetapi tidak menangani penyelesaian transaksi secara langsung. Sebaliknya, CIPS tidak hanya menyediakan layanan pesan keuangan tetapi juga menangani penyelesaian transaksi dalam RMB secara langsung. CIPS juga memungkinkan penyelesaian transaksi *real-time* atau dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan SWIFT, yang sering kali memerlukan beberapa hari untuk menyelesaikan pembayaran internasional.

CIPS menggunakan sistem *single messaging*, yang berarti bahwa pesan pembayaran dan penyelesaian transaksi dilakukan dalam satu sistem terpadu, ini memungkinkan transaksi berlangsung lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan sistem yang terpisah. CIPS sangat dioptimalkan untuk transaksi dalam RMB dan dirancang agar mitra dagang Tiongkok dapat mengurangi eksposur terhadap risiko sanksi Barat, serta menurunkan ketergantungan pada dolar AS. Disisi lain, penyelesaian transaksi SWIFT masih harus dilakukan melalui sistem lain, seperti sistem kliring nasional atau bank koresponden. SWIFT sangat luas digunakan dan menjadi standar global, namun karena berbasis Belgia dan di bawah pengaruh negara-negara Barat, sistem ini dapat digunakan sebagai alat sanksi ekonomi, seperti yang pernah terjadi di beberapa negara.

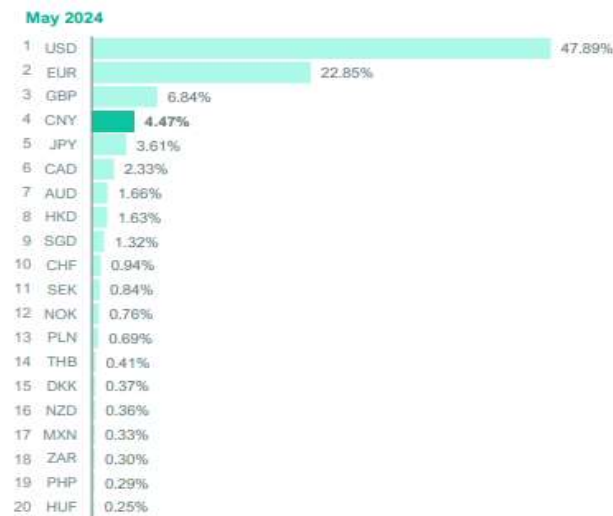
Statistik penggunaan yuan dalam perdagangan lintas negara terus mengalami peningkatan. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memperkuat peran yuan dalam perdagangan internasional, menandai langkah penting dalam internasionalisasi mata uangnya. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, tetapi juga meningkatkan pengaruh ekonominya di kancah global. Dengan meningkatnya pangsa pasar renminbi (RMB) dalam transaksi perdagangan dan keuangan di kancah internasional, menjadikan RMB tetap mempertahankan

posisinya sebagai mata uang paling aktif kelima untuk pembayaran global berdasarkan nilai, dengan pangsa sebesar 3,71% pada September 2023. Secara keseluruhan, nilai pembayaran RMB meningkat sebesar 2,77% dibandingkan dengan Agustus 2023, sementara secara umum semua mata uang pembayaran menurun sebesar 3,96% (SWIFT, 2023).



Gambar 5.6 Pangsa RMB sebagai mata uang pembayaran global September 2023 (SWIFT, 2023).

Satu tahun setelahnya, pada 2024 total pembayaran dan penerimaan lintas batas dalam RMB mencapai 4,47%, menjadikannya posisi keempat teratas sebagai mata uang paling aktif untuk pembayaran global berdasarkan nilai. Dalam perdagangan barang, penggunaan RMB mencapai 26,5% dari total penyelesaian transaksi, naik dari 25,8% pada tahun 2023. Sementara itu, dalam perdagangan jasa, penggunaan RMB meningkat 22,3% menjadi 1.2 triliun yuan, mencerminkan semakin besarnya peran mata uang China dalam transaksi global.



Gambar 5.7 Pangsa RMB sebagai mata uang pembayaran global Mei 2024
(SWIFT, 2024).

Banyak negara menggunakan RMB untuk pembayaran internasional mereka, sehingga terjadi lonjakan dalam jumlah transaksi penggunaan mata uang China itu selama beberapa tahun terakhir yang menjadikan fenomena ini sebagai peningkatan yang signifikan bagi renminbi. China melihat fenomena ini sebagai peluang untuk mempromosikan penggunaan RMB secara internasional.

CIPS menawarkan alternatif yang kredibel terhadap sistem pembayaran global yang selama ini didominasi oleh SWIFT. Dengan fitur *Real-Time Gross Settlement* (RTGS), CIPS memungkinkan penyelesaian transaksi secara langsung, cepat, dan aman, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dan ketidakpastian pembayaran. Sistem ini juga memperluas jam operasional dengan menggandeng institusi keuangan internasional di luar zona waktu Tiongkok, sehingga meningkatkan efisiensi dan jangkauan global. Selain itu, CIPS juga memainkan peran penting dalam mendukung inisiatif besar seperti *Belt and Road Initiative* (BRI). Sistem ini memfasilitasi transaksi keuangan proyek-proyek infrastruktur lintas negara, seperti koridor ekonomi China-Pakistan, dan pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia, dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang dan sistem pembayaran Barat. Kehadiran CIPS semakin relevan di tengah ketegangan geopolitik, seperti konflik

Rusia-Ukraina yang menyebabkan sejumlah bank Rusia terputus dengan SWIFT. Situasi ini menyoroti pentingnya diversifikasi infrastruktur pembayaran global, dimana CIPS menjadi salah satu solusi untuk mengurangi risiko sistemik akibat dominasi satu sistem tunggal.

Meski pertumbuhan CIPS sangat pesat, tantangan utama yang dihadapi adalah membangun kepercayaan (*trust*) dan mendorong adopsi global. Banyak negara dan institusi keuangan masih mempertanyakan transparansi regulasi dan perlindungan data dalam sistem yang dikendalikan oleh Tiongkok ini. Untuk menjadi platform global yang kredibel, CIPS perlu meningkatkan transparansi dan menyelaraskan praktik regulasinya dengan standar internasional, termasuk perlindungan konsumen dan anti pencucian uang. Hambatan regulasi dan politik juga menjadi faktor penghambat utama. Negara-negara Barat, Khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, cenderung berhati-hati terhadap dominasi China di sektor keuangan global. Selain itu, regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi di beberapa negara anggota dapat memperlambat integrasi CIPS ke dalam sistem pembayaran internasional yang sudah mapan.

Ke depan, CIPS diproyeksikan akan terus tumbuh dan memperluas pengaruhnya, seiring dengan upaya Tiongkok menginternasionalisasikan RMB dan memperkuat kemitraan ekonomi global. Pada 2023, volume penyelesaian transaksi RMB melalui CIPS meningkat 30%, menandakan kepercayaan internasional yang semakin kuat terhadap sistem ini. Dengan dukungan proyek-proyek BRI dan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur pembayaran lintas negara yang efisien, CIPS berpotensi menjadi alternatif utama bagi SWIFT, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa Timur. Namun, untuk mencapai status sistem pembayaran global yang setara dengan SWIFT, CIPS harus berinovasi, memperluas partisipasi internasional, dan mengatasi hambatan regulasi serta politik. Keberhasilan CIPS dimasa depan bergantung pada kemampuan China untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki kerangka regulasi, dan melakukan inovasi teknologi. Jika tantangan-tantangan ini dapat

diatasi, CIPS berpotensi menjadi pilar penting dalam arsitektur keuangan global di masa depan.

5.1.5. *Belt and Road Initiative (BRI)*

Belt and Road Initiative (BRI), atau dikenal juga sebagai Inisiatif Sabuk dan Jalan, merupakan sebuah kebijakan global ambisius yang diinisiasi oleh Presiden China, Xi Jinping, pada tahun 2013. BRI bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama ekonomi antara China dan berbagai negara di Asia, Eropa, Afrika, dan Oseania melalui pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan investasi lintas negara. Inisiatif ini lahir dari kebutuhan China untuk memperkuat pengaruh globalnya, serta mengamankan pasokan energi dan sumber daya. BRI juga berupaya mengulang kejayaan jalur sutra kuno yang pernah menjadikan China sebagai pusat perdagangan dunia.

Secara resmi, pemerintah China mendefinisikan BRI sebagai sebuah strategi pembangunan global yang terdiri dari dua komponen utama yaitu *Silk Road Economic Belt* (jalur darat) dan *21st Century Maritime Silk Road* (jalur laut). Kedua jalur ini dirancang untuk menghubungkan China dengan negara-negara di Eropa, Asia Tengah, Asia Tenggara, Afrika, dan sekitarnya melalui jaringan infrastruktur, perdagangan, dan investasi. Dalam dokumen resmi "*The Belt and Road Initiative: Progress, Contributions and Prospects*" yang diliris oleh pemerintah China, BRI disebut sebagai upaya bersama untuk membangun konektivitas dan kerjasama di antara negara-negara peserta melalui koordinasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, perdagangan bebas hambatan, integrasi keuangan, dan penguatan hubungan antar masyarakat (*people to people bonds*).

BRI pertama kali diumumkan oleh Presiden Xi Jinping pada 7 September 2013 saat kunjungan ke Kazakhtan. Dalam pidatonya di Nazarbayev University, di mana ia memperkenalkan konsep *Silk Road Economic Belt*, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara China dan negara-negara di Eurasia. Sebulan kemudian tepatnya pada 3 Oktober 2013, dalam pidatonya di parlemen Indonesia, Xi Jinping meluncurkan *21st Century Maritime Silk Road*

yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas maritim antara China dan negara-negara Asia Tenggara, Afrika Timur, dan Timur Tengah. Sejak saat itu, inisiatif ini berkembang pesat dan menjadi salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi paling ambisius di China. Menurut *World Economic Forum*, BRI telah melibatkan lebih dari 150 negara dan organisasi internasional serta melibatkan investasi lebih dari 1 triliun USD dalam berbagai proyek pembangunan. Pemerintah China secara resmi membentuk kelompok kerja khusus untuk mengelola dan mempromosikan BRI, dan pada tahun 2015 menerbitkan dokumen “*Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road*” sebagai pedoman pelaksanaan inisiatif ini.

BRI memiliki beberapa tujuan utama yang mencerminkan visi China dalam membangun konektivitas global, yang secara resmi dinyatakan oleh pemerintah China dan diakui secara luas oleh berbagai sumber akademik serta organisasi internasional, yang diantaranya adalah:

1. Membangun jaringan infrastruktur yang saling terhubung antar negara, seperti jalan, kereta api, pelabuhan, dan jaringan listrik, untuk memperlancar arus barang, jasa, dan manusia.
2. Meningkatkan integrasi ekonomi regional dan internasional melalui kerja sama investasi, perdagangan, dan pembangunan bersama yang saling menguntungkan.
3. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur fisik di negara-negara peserta, termasuk proyek-proyek besar seperti kereta api lintas negara, pelabuhan, dan fasilitas energi.
4. Mempermudah perdagangan lintas batas dan investasi antar negara peserta, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan integritas pasar global.
5. Mendorong koordinasi kebijakan antar pemerintah, memperkuat hubungan antar masyarakat, serta mempromosikan pertukaran budaya dan pemahaman bersama untuk menciptakan kerjasama internasional yang efektif.

Silk Road Economic Belt (jalur sutra darat) adalah koridor ekonomi yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Eropa melalui jalur darat. Jalur ini mencakup enam koridor ekonomi utama, termasuk New Eurasian Land Bridge, China-Mongolia-Rusia Economic Corridor, dan China-Pakistan Economic Corridor. Menurut Xinhua Silk Road Information Service, *Silk Road Economic Belt* mencakup lebih dari 20 negara, termasuk Kazakhstan, Rusia, Iran, Turki, dan Pakistan. Jalur ini memiliki panjang lebih dari 8.000 km, menghubungkan berbagai pusat ekonomi utama di Eurasia. Jalur *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) yang membentang 3.000 km dari Kashgar (China) ke Gwadar (Pakistan). Proyek ini mencakup pembangunan jalan raya Peshawar-Karachi (392 km), PLTU Sahiwal (1.320 mw), dan Pelabuhan Gwadar yang disewa pemerintah China selama 40 tahun. Selain itu, koridor Asia Tengah yang meliputi 5 negara (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan) dengan total populasi 72 juta dan PDB gabungan \$291 miliar.

21st Century Maritime Silk Road adalah jalur perdagangan laut yang menghubungkan Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Timur, dan Eropa melalui jalur maritim. Jalur ini mencakup beberapa pelabuhan utama, termasuk Shanghai, Jakarta, Colombo, Mombasa, dan Suez. Jalur ini memiliki panjang lebih dari 15.000 km, dengan lebih dari 10 pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pusat perdagangan global. Selain itu, China telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur maritim, termasuk proyek Pelabuhan Gwadar di Pakistan dan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Dimana pelabuhan Hambantota di Sri Lanka disewa selama 99 tahun dengan investasi \$1.12 miliar, pelabuhan Kyaukpyu di Myanmar disewa selama 50 tahun untuk akses ke Teluk Benggala, dan 80% perdagangan maritim Tiongkok melewati Selat Malaka, menjadikan Singapura dan Kuala Lumpur sebagai simpul vital.

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh *The Third Belt and Road Forum for International Cooperation* pada Oktober 2023, di sektor infrastruktur, BRI telah membangun sebanyak 3.000 km rel kereta api baru salah satunya jalur kereta Jakarta-Bandung, dan 20.000 km jalan raya di 60 negara. Investasi infrastruktur

mencapai \$4-8 triliun dengan target selesai 2049. Pada sektor energi, BRI telah membangun PLTU di Pakistan (Sahiwal, Port Qasim) dengan total kapasitas 4.620 mw dan proyek pipa gas China-Myanmar sepanjang 2.520 km mengalirkan 12 miliar m³ gas per tahun. Di sektor transportasi, koridor Chongqing-Duisburg (Eropa) mengurangi waktu pengiriman barang dari 36 hari (laut) menjadi 13 hari (kereta api) selain itu pelabuhan Gwadar juga meningkatkan kapasitas kargo di Pakistan menjadi 300 juta ton per tahun. Terakhir, sektor ekonomi digital dengan investasi \$500 juta untuk kabel bawah laut PEACE (*Pakistan-East Afrika Connecting Europe*) menjalur sepanjang 15.000 km serta proyek “*Digital Silk Road*” mencakup 34 satelit komunikasi yang menjangkau 60 negara. Menurut Bank Dunia, BRI berpotensi meningkatkan arus perdagangan global sebesar 4,1% dan mengurangi biaya logistik sebesar 1,1-2,2%. Di Asia Timur, inisiatif ini diproyeksikan mendorong pertumbuhan PDB tahunan sebesar 2,6-3,9%. Namun, prinsip keberlanjutan ditekankan melalui penerapan standar hijau pada 35% proyek infrastruktur sejak 2021.

Untuk mendukung pendanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur global yang diinisiasi oleh pemerintah China ini, berbagai bank pembangunan pun berperan dalam menyediakan pembiayaan melalui pinjaman, investasi langsung, dan kerja sama pemerintah-swasta (PPP). Salah satu lembaga keuangan yang membantu membiayai proyek BRI adalah Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada 2016 dengan tujuan mendukung pembangunan infrastruktur di Asia. AIIB memiliki 103 anggota dan telah mendanai lebih dari 200 proyek dengan total investasi lebih dari 40 miliar USD. AIIB berfokus pada proyek-proyek yang meningkatkan konektivitas regional, termasuk pembangunan jalan, rel kereta api, dan jaringan energi. AIIB berfungsi sebagai platform pembiayaan yang profesional dan efisien untuk proyek infrastruktur di negara-negara anggota BRI. Bank ini berkolaborasi dengan institusi seperti *China Development Bank* (CDB), dan *Exim Bank of China*. AIIB menawarkan pinjaman dengan bunga kompetitif dan dukungan teknis, sehingga memudahkan negara-negara berkembang untuk mengakses dana

pembangunan. AIIB menerapkan prinsip “*lean, clean, and green*” dalam operasionalnya, yang berarti efisiensi biaya, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan dalam proyek yang dibiayai.

Selain AIIB, *Silk Road Fund* (SRF) juga turut serta membiayai proyek BRI ini. *Silk Road Fund* (SRF) merupakan dana investasi yang dibentuk pada tahun 2014 dengan modal sekitar \$40 miliar, yang dikelola oleh pemerintah Tiongkok melalui beberapa lembaga keuangan negara seperti *State Administration of Foreign Exchange* (SAFE) dengan persentase pemegang saham sebanyak 65%, *China Investment Corporation* (CIC) sebanyak 15% dan *China Exim Bank* sebanyak 15%. SRF berfokus pada investasi langsung dalam proyek-proyek strategis BRI, terutama di sektor energi, pertambangan, dan infrastruktur transportasi. Dana ini berfungsi sebagai instrumen utama untuk mendukung implementasi proyek BRI dengan investasi jangka panjang, serta mengurangi ketergantungan pada pinjaman komersial. Contohnya, SRF terlibat dalam pembiayaan proyek jalan dan pelabuhan di beberapa negara Asia Tenggara dan Afrika, yang memperkuat konektivitas dan integrasi ekonomi kawasan. Salah satu proyek utama yang didanai oleh *Silk Road Fund* adalah pembangunan pelabuhan Gwadar di Pakistan, yang menjadi bagian dari *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC), *Silk Road Fund* juga terlibat dalam proyek pembangunan jalan Trans Papua senilai Rp 2,6 triliun (US\$182 million) bersama BRI dan BNI.

Bank Of China (BOC) bersama dengan bank milik negara lainnya seperti *Industrial & Commercial Bank Of China* (ICBC), *China Construction Bank* (CCB), dan *Agricultural Bank Of China* (ABC) berperan sebagai sumber pendanaan utama untuk proyek-proyek BRI melalui pembiayaan komersial dan investasi langsung. Bank-bank ini menyediakan pinjaman sindikasi, kredit ekspor-impor, serta layanan keuangan lainnya yang mendukung perusahaan Tiongkok dan mitra lokal dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Sebagai contoh, *Bank Of China* (BOC) telah memberikan pembiayaan kepada proyek pembangunan rel kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia dan proyek jaringan listrik di Afrika. Contoh lain, ICBC yang merupakan bank terbesar di dunia berdasarkan

kapitalisasi pasar dan memiliki pengalaman luas dalam pembiayaan proyek infrastruktur besar. Bank-bank ini mendukung internasionalisasi mata uang yuan (RMB) dalam transaksi pembiayaan BRI.

Dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur para anggotanya, BRI melakukan beberapa skema utama seperti:

1. Pinjaman sindikasi dari AIIB, bank milik negara Tiongkok, dan lembaga keuangan lainnya menyediakan modal besar untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya, proyek jalan trans Papua di Indonesia dibiayai dengan pinjaman konvensional sebesar Rp2,36 triliun dan pinjaman syariah sebesar Rp 300 miliar. Pinjaman ini biasanya memiliki tenor panjang dan bunga yang kompetitif.
2. Melalui *Silk Road Fund* dan lembaga keuangan milik negara, Tiongkok melakukan investasi langsung ke proyek-proyek strategis, yang tidak hanya memberikan modal tetapi juga transfer teknologi dan manajemen. Investasi langsung ini mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan infrastruktur di negara mitra BRI. FDI Tiongkok di Indonesia tumbuh mencapai 400% selama 2010-2017 dengan 58,3% proyek beralokasi di Sulawesi dan 32,1% di Jawa. Contoh investasi langsung seperti saat pembangunan pelabuhan Gwadar di Pakistan, pembangunan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka dan rel kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.
3. Model Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPBU) digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan membagi risiko antara pemerintah dan sektor swasta. Skema ini banyak diterapkan pada proyek transportasi dan energi, yang mendominasi 45% proyek transportasi di Indonesia dengan tingkat pengembalian investasi (IRR) rata-rata antara 12-15%, sehingga menarik minat investor swasta baik lokal maupun asing. Model *Public-Private Partnership* (PPP) digunakan untuk mengurangi beban keuangan pemerintah dan meningkatkan efisiensi proyek.

Sejak awal peluncuran BRI, China secara aktif mendorong penggunaan RMB dalam transaksi perdagangan bilateral dan multilateral dengan negara-negara peserta BRI. Hal ini dilakukan melalui perjanjian perdagangan dan keuangan yang memungkinkan pembayaran dalam RMB, sehingga mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Penggunaan RMB dalam transaksi internasional terus meningkat, meskipun masih relatif kecil dibandingkan dolar, dengan nilai transaksi RMB yang signifikan di beberapa negara mitra BRI. Hingga 2024, sebanyak 149 negara telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan China dalam kerangka BRI, yang membuka peluang penggunaan RMB dalam berbagai proyek investasi terbesar BRI dengan nilai investasi mencapai sekitar USD 9,3 miliar pada 2024, dimana sebagian transaksi menggunakan RMB untuk mempermudah pembayaran dan mitigasi risiko nilai tukar. Kesepakatan China-Indonesia pada 2020 meningkatkan penggunaan RMB hingga 63% dari total transaksi valas Indonesia (Rp439 triliun). Kesepakatan bilateral ini membantu memperluas jaringan penggunaan RMB di Asia, Timur Tengah, dan Afrika.

Pada 2016, RMB resmi dimasukkan ke dalam *Special Drawing Right* (SDR) IMF dengan porsi sekitar 10,92%, menjadikannya salah satu mata uang cadangan utama dunia. Ini meningkatkan kredibilitas RMB sebagai mata uang internasional dan mendorong negara-negara BRI untuk mengadopsi RMB dalam cadangan devisa mereka dan transaksi lintas batas. Meski demikian, pada 2019, hanya sekitar 1,94% transaksi global menggunakan RMB, menunjukkan ruang besar untuk ekspansi internasional. Menurut halaman resmi (IMF, n.d.) *Special Drawing Right* (SDR) adalah aset cadangan internasional yang dibuat oleh IMF pada tahun 1969 yang berfungsi untuk melengkapi cadangan resmi negara-negara anggotanya. SDR bukanlah mata uang fisik melainkan klaim potensial atas mata uang anggota IMF yang dapat digunakan secara bebas. Dengan demikian, SDR dapat menyediakan likuiditas bagi suatu negara. SDR didefinisikan sebagai keranjang mata uang yang terdiri dari lima mata uang utama dunia yaitu dolar AS, Euro, Yuan Tiongkok, Yen Jepang, dan Pound Inggris. Perbedaan yang signifikan antara SDR dengan cadangan devisa global terletak di komponennya, dimana

SDR nilainya didasarkan pada sekeranjang lima mata uang utama dunia (dolar AS, euro, yuan, yen, dan pound sterling) sementara cadangan devisa global terdiri dari berbagai aset seperti mata uang asing (terutama dolar AS), emas moneter, posisi cadangan di IMF, dan instrumen keuangan lainnya. IMF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dewan eksekutifnya telah menentukan bobot berdasarkan perkembangan perdagangan dan pasar keuangan dari tahun 2017 hingga 2021. IMF menaikkan bobot mata uang AS menjadi 43,38% dari 41,73% dan yuan menjadi 12,28% dari 10,92%. Bobot euro turun menjadi 29,31% dari 30,93%, yen turun menjadi 7,59% dari 8,33% dan pound Inggris turun menjadi 7,44% dari 8,09% (Pollard, 2022). Adapun porsi keranjang mata uang dunia dalam *Special Drawing Right* (SDR) di tahun 2022 diantaranya:

Currency	Weights determined in the 2022 review	Fixed number of units of currency for a 5 year period Starting Aug 1, 2022
US dollar	43.38	0.57813
Euro	29.31	0.37379
Chinese Renminbi	12.28	1.0993
Japanese Yen	7.59	13.452
Pound Sterling	7.44	0.080870

Gambar 5.8 Porsi Keranjang Mata Uang Dunia Dalam *Special Drawing Right* (SDR) di tahun 2022 (IMF, n.d.).

Tiongkok juga mengembangkan infrastruktur keuangan pendukung internasionalisasi RMB, termasuk peluncuran RMB digital (e-CNY). Digitalisasi ini mempermudah transaksi lintas batas dan pembayaran internasional dalam RMB, serta digunakan dalam subsidi dan program sosial di dalam negeri sebagai *Pilot Project* yang digunakan di 5 kota utama China yaitu Shanghai, Guangzhou, dll). Melalui BRI, digital RMB diharapkan dapat mempercepat adopsi mata uang ini di negara-negara mitra, memperkuat posisi RMB dalam perdagangan dan

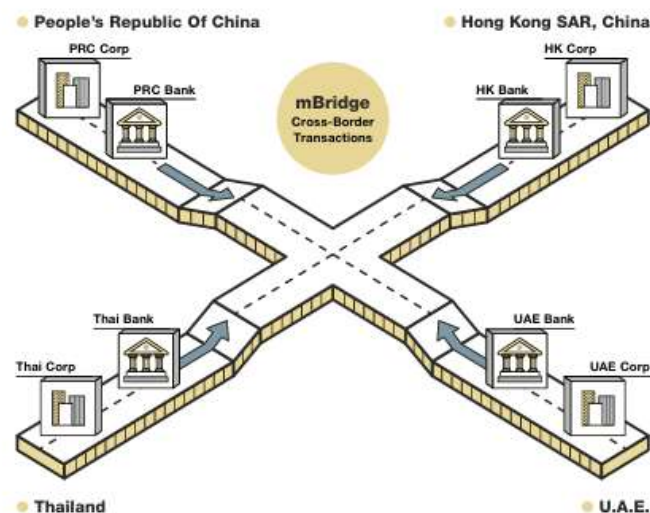
investasi. Menurut *Green Finance Development Center China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Reprort 2024*, total keterlibatan China dalam proyek BRI mencapai USD\$1.175 triliun sejak 2013, dengan USD\$704 miliar dalam kontrak konstruksi dan USD\$470 miliar dalam investasi non-keuangan. Meskipun sebagian besar pembiayaan proyek masih menggunakan dolar AS, ada tren peningkatan penggunaan RMB, terutama dalam pinjaman bilateral dan investasi langsung yang didukung lembaga keuangan China. Hal ini menciptakan ekosistem keuangan yang mendukung internasionalisasi RMB di negara-negara BRI.

5.1.6. Multiple CBDC Bridge (mBridge)

mBridge (*Multiple CBDC Bridge*) merupakan platform mata uang digital bank sentral (CBDC) lintas batas yang dikembangkan untuk memfasilitasi pembayaran dan transaksi valuta asing secara *real-time, peer to peer*, dan terdesentralisasi. Diluncurkan pada tahun 2021, proyek mBridge dipelopori oleh BIS (*Bank of International Settlements*), dan juga bekerja sama dengan empat bank sentral lainnya dari *Digital Currency Institute of the People's Bank of China*, *Bank of Thailand*, *Central Bank of the United Arab Emirates (UEA)*, dan *Hong Kong Monetary Authority*. Pada tahun 2024, *Saudi Central Bank* juga bergabung dalam proyek ini. mBridge dibentuk sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dari pembayaran lintas batas internasional, dengan biaya transaksi yang tinggi, keterlambatan, ketidakjelasan transaksi, dan inklusivitas keuangan yang terbatas. Negara-negara yang berpartisipasi berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (AS) dengan menciptakan sistem keuangan alternatif yang menghindari infrastruktur tradisional yang didominasi Barat, seperti *The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* (Manini, 2024).

Dibangun di atas teknologi buku besar terdistribusi (DLT), platform ini terhubung langsung ke mata uang digital bank sentral (CBDC). CBDC mirip dengan mata uang kripto, kecuali nilainya tetap stabil dan diatur oleh bank sentral masing-masing negara. Perkembangan ini membuat langkah signifikan menuju peningkatan transparansi, keamanan, dan keandalan dalam perdagangan lintas

zona yang berbeda (Bank of International Settlements, n.d.). Platform ini dibangun di atas *blockchain* baru yang disebut *mBridge Ledger*, yang mendukung transaksi *peer-to-peer* dan pertukaran valuta asing secara real-time. Sejak peluncurannya pada 2021, mBridge telah melewati tahap pilot dengan transaksi bernilai nyata pada tahun 2022, dan pada pertengahan 2024 berhasil mencapai tahap *minimum viable product* (MVP). Ini menandakan kesiapan platform untuk bergerak dari fase uji coba ke aplikasi dunia nyata, dengan peluang bagi sektor swasta untuk mengusulkan solusi dan kasus penggunaan baru yang dapat mempercepat adopsi dan pengembangan lebih lanjut.



Gambar 5.9 Alur perhubungan batas negara mBridge (Bank of International Settlements, n.d.).

Dari sisi teknologi, mBridge compatible dengan *Ethereum Virtual Machine* (EVM), memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam penerapan *smart contracts* dan solusi inovatif lainnya. Infrastruktur ini juga menyediakan Application Programming Interface (API) khusus untuk memudahkan integrasi dengan sistem perbankan yang ada. Selain itu, mBridge menerapkan sistem penandatanganan kunci pseudo-anonim dan enkripsi data untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan transaksi antarbank dan antarnegara. Arsitektur proyek ini bersifat desentralisasi dengan setiap bank sentral pendiri

mengoperasikan node validator, serta dilengkapi dengan kerangka tata kelola dan aturan hukum khusus untuk mengelola tantangan yang unik pada platform multi-negara ini. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pada akhir Oktober 2024, BIS mengumumkan akan mengakhiri keterlibatannya dalam proyek ini dan menyerahkan pengelolaan mBridge sepenuhnya ke bank-bank sentral peserta. Selain itu, proyek mBridge telah menarik perhatian berbagai bank sentral dan lembaga keuangan global. Memiliki 31 anggota pengamat termasuk *Asia Infrastructure Investment Bank*, Bank Indonesia, *European Central Bank*, *International Monetary Fund*, *World Bank*, dan banyak lainnya yang menandakan minat dan potensi ekspansi yang lebih luas di masa depan.

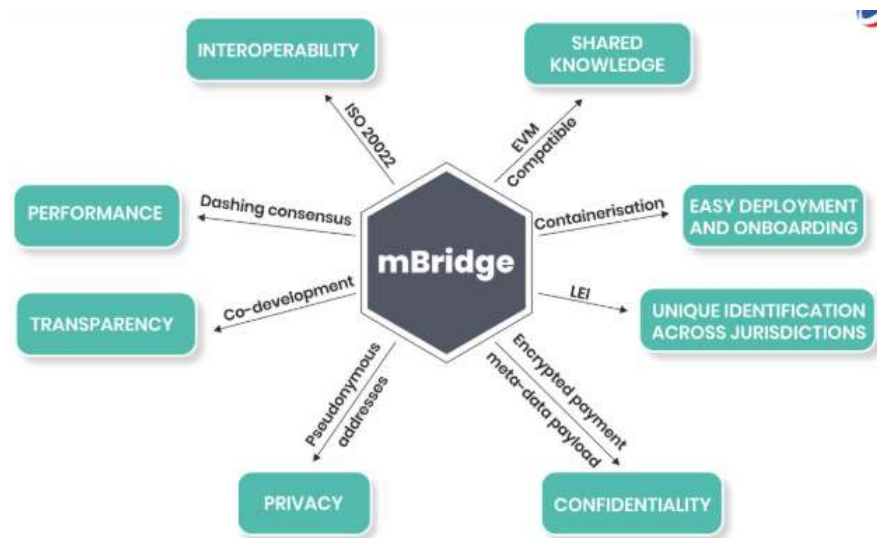
Dalam hal validasi transaksi, mBridge menggunakan mekanisme konsensus yang melibatkan node validator yang dioperasikan oleh bank sentral peserta. Berbeda dengan node biasa yang hanya menyimpan dan menyebarkan data transaksi, node validator secara aktif memproses transaksi, memastikan keabsahan setiap transaksi sesuai aturan konsensus, dan mengelompokkan transaksi yang valid ke dalam blok baru. Setiap transaksi yang terjadi harus disetujui oleh sejumlah validator sehingga memastikan integritas dan keabsahan data tanpa perlu perantara pusat. Setelah blok baru disetujui oleh validator lain, blok tersebut kemudian ditambahkan ke rantai utama blockchain. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga memperkuat kepercayaan antar yurisdiksi yang terlibat dalam ekonomi mBridge.

Pada laporan resmi *Connecting economies through CBDC* (BIS, 2022) mencatat bahwa *Pilot project* mBridge yang berlangsung selama enam minggu melibatkan 20 bank komersial besar dari empat yuridiksi. Selama periode ini, tercatat sebanyak 164 transaksi pembayaran lintas batas dan pertukaran valuta asing dengan mekanisme *Payment versus Payment* (PvP) yang diselesaikan secara instan. Total nilai CBDC yang diterbitkan di platform mencapai sekitar USD 12,1 juta, sementara nilai transaksi yang berhasil diselesaikan mencapai USD 22,1 juta. Secara rinci, nilai transaksi yang terjadi di masing-masing mata uang selama pilot diantaranya ada HK\$13,2 juta dalam e-HKD, kemudian ¥23,6 juta dalam e-CNY,

60,1 juta dalam e-AED, dan 23,5 juta dalam e-THB. Angka ini menunjukkan bahwa nilai transaksi yang difasilitasi hampir dua kali lipat dari jumlah CBDC yang diterbitkan, menandakan efisiensi dan likuiditas yang tinggi dalam sistem. Dari 20 bank yang berpartisipasi, terdapat potensi hingga 150 koneksi bilateral, dengan 42 koneksi unik lintas batas yang aktif selama pilot. Rata-rata, setiap bank melakukan transaksi dengan dua bank di negara lain, menggunakan mata uang digital lokal salah satu pihak. Hal ini menggambarkan fleksibilitas dan jangkauan luas platform dalam menghubungkan berbagai institusi keuangan secara langsung.

Selain aspek teknis, mBridge juga dirancang agar mudah di adopsi oleh berbagai yuridiksi dengan memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola lokal. Platform ini mendukung standar internasional seperti ISO 20022 untuk format data transaksi dan menggunakan sistem identifikasi unik seperti *Legal Entity Identifier* (LEI) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini memungkinkan mBridge untuk beroperasi secara harmonis di berbagai sistem keuangan nasional tanpa mengorbankan keamanan dan kepatuhan hukum. Dibangun di atas Blockchain khusus bernama *mBridge Ledger*, platform ini menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan sistem pembayaran lintas batas tradisional seperti SWIFT. mBridge mampu memangkas waktu transfer lintas batas dari 3-5 hari yang biasa terjadi pada sistem SWIFT menjadi hanya beberapa detik saja. Hal ini dicapai melalui mekanisme pembayaran *peer-to-peer* secara langsung antar bank peserta tanpa perlu perantara jaringan koresponden yang kompleks. Dengan menghilangkan jaringan perbankan koresponden, mBridge menurunkan biaya transaksi secara signifikan. Sistem ini memungkinkan hubungan langsung antar bank sentral dan bank komersial, sehingga mengurangi biaya overhead dan margin yang biasanya dibebankan oleh perantara. Menggunakan mekanisme *Payment versus Payment* (PvP) yang memastikan bahwa pertukaran mata uang digital antar bank dilakukan secara simultan, sehingga mengurangi risiko gagal bayar atau risiko penyelesaian yang sering terjadi pada sistem lama. Sistem SWIFT yang dikelola secara sentral dan dipengaruhi oleh regulasi AS sering digunakan sebagai alat tekanan ekonomi

melalui sanksi finansial. mBridge, yang merupakan platform terdesentralisasi antar bank sentral, dapat mengurangi ketergantungan negara-negara terhadap sistem ini, sehingga mengurangi dampak dominasi dolar dan pengaruh geopolitik AS dalam perdagangan internasional.



Gambar 5.10 Elemen-elemen Kunci mBridge

Walaupun tergabung dalam aliansi yang sama yaitu BRICS, tidak seluruh negara-negara anggota BRICS ikut serta terlibat dalam proyek mBridge. Menurut *Fintech News Singapore* pada 4 November 2024 lalu, merilis pernyataan bahwa tidak seluruh anggota BRICS terlibat dalam inisiatif pembayara lintas batas yang dikembangkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) ini, diantaranya ada Rusia yang tidak secara resmi terlibat, meskipun ada spekulasi negara-negara BRICS dapat menggunakan mBridge sebagai alternatif sistem pembayaran global, BIS telah menegaskan bahwa proyek ini tidak terikat dengan BRICS Bridge, sebuah inisiatif yang sedang dibahas dalam pertemuan BRICS. Disusul dengan Brazil yang tidak termasuk dalam daftar negara yang berpartisipasi dalam proyek mBridge. Negara ini lebih fokus pada pengembangan CBDC domestik, yang dikenal dengan Drex, dan belum menunjukkan indikasi untuk bergabung dengan mBridge dalam waktu dekat. Berbanding terbalik dengan Rusia dan Brazil, China sebagai negara pelopor dan salah satu negara yang paling aktif dalam

pengembangan mBridge. *People's Bank of China* (PBoC) telah berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan teknologi proyek ini dan bahkan mengusulkan untuk *Open-source* perangkat lunaknya. Selain itu, *Bank of China* (Hong Kong) telah mengintegrasikan mBridge untuk memungkinkan pembayaran otomatis bagi klien korporatnya. Sementara itu, India dan Afrika Selatan menjadidi bagian dari negara pengamat atau observasi dimana India dan Afrika Selatan belum menjadi peserta aktif dalam proyek mBridge tetapi menunjukkan minat dalam pengembangan CBDC dan sistem pembayaran lintas batas. *Reserve Bank Of India* (RBI) dan *South African Reserve Bank* (SARB) masih dalam tahap eksplorasi terkait integrasi dengan sistem pembayaran berbasis blockchain seperti mBridge.

Secara keseluruhan, mBridge menunjukan potensi besar dalam mengubah lanskap pembayaran lintas batas global. Dengan kemampuan menyelesaikan transaksi secara *real-time*, mengurangi biaya, dan meningkatkan keamanan, platform ini dapat menjadi fondasi bagi sistem pembayaran internasional yang lebih efisien dan tahan terhadap tekanan geopolitik, *Pilot project* yang berhasil ini membuka jalan bagi perluasan penggunaan *multi-CBDC* di masa depan, yang diharapkan dapat mempercepat integrasi ekonomi global dan memperkuat sistem keuangan internasional.

Setelah diuraikan secara mendetail mengenai berbagai strategi dedolarisasi yang dikembangkan oleh BRICS, mulai dari mekanisme teknis, tujuan utama, hingga implikasi yang menyertainya, tampak bahwa masing-masing strategi memiliki kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung agenda bersama. Oleh karena itu, untuk mempermudah pembaca melihat keterkaitan antarstrategi secara lebih ringkas dan terstruktur, seluruh poin utama yang telah dijelaskan dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Strategi Dedolarisasi BRICS

Inisiatif	Strategi Dedolarisasi	Tujuan Utama	Penerapan Nyata
<i>Local Currency Settlement (LCS)</i>	Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional	Kurangi dominasi dolar, stabilitas moneter, dorong kemandirian sistem keuangan	China 30%, India 18%, Rusia 65%, Brazil 10%, Afrika Selatan 12% perdagangan BRICS tanpa USD
<i>New Development Bank (NDB)</i>	Bank pembangunan BRICS untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan	Kurangi dominasi lembaga keuangan Barat (IMF, WB), dukung proyek pembangunan negara berkelanjutan	120 proyek senilai \$39 miliar USD tahun 2024: China: \$8,1 miliar; India \$7,5 miliar USD ; Afrika Selatan: \$5,3 miliar USD
<i>Contingent Reserves Arrangement (CRA)</i>	Mekanisme dana darurat BRICS untuk menghadapi krisis likuiditas	Alternatif IMF; pelindung ekonomi saat krisis tanpa syarat ketat	Dana awal \$100 miliar USD; kontribusi terbesar China (\$41 miliar USD), Rusia (\$18 miliar USD), Brazil (\$18 miliar USD), India (\$18 miliar USD), Afrika Selatan (\$5 miliar USD)
<i>Cross-border International Payment System (CIPS)</i>	Sistem pembayaran lintas batas alternatif terhadap SWIFT	Internasionalisasi yuan, kurangi resiko sanksi Barat, efisiensi transaksi RMB	2023: 6,6 juta transaksi senilai US\$17 triliun, 4.900+ institusi dari 119 negara, transaksi RMB tumbuh 30%
<i>Belt and Road Initiative (BRI)</i>	Pembangunan infrastruktur global (kereta, pelabuhan,,	Integrasi regional pengaruh geopolitik, perluas penggunaan RMB	Total proyek BRI: US\$1.175 triliun, penggunaan RMB dalam transaksi

	energi) dengan kerja sama bilateral	dalam proyek lintas negara	meningkat, pelabuhan Gwandar, kereta Jakarta-Bandung, proyek Trans Papua
<i>Multiple CBDC Bridge (mBridge)</i>	Platform mata uang digital bank sentral (CBDC) untuk transaksi lintas batas	Sistem keuangan <i>peer-to-peer</i> bebas dari SWIFT, efisiensi tinggi, <i>real-time settlement</i>	China, Thailand, UEA aktif, 2024: 164 transaksi, US\$ 22,1 juta, real time PvP cross-border transaction, pengganti sistem koresponden tradisional

5.2. Relevansi Nilai Masalah Dalam Aksi Dedolarisasi BRICS

Sebagai respons terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional, kelompok negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) melakukan langkah strategis yang dikenal dengan istilah dedolarisasi. Dominasi dolar AS selama lebih dari 70 tahun telah menjadikan mata uang ini sebagai alat utama dalam hampir 80% transaksi perdagangan global dan hampir 60% cadangan devisa dunia. Ketergantungan yang tinggi ini memberikan keuntungan ekonomi maupun politik besar bagi Amerika Serikat, sekaligus menjadi hambatan signifikan bagi negara-negara berkembang dalam BRICS untuk memperkuat kedaulatan ekonomi mereka. Dedolarisasi BRICS adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan ini dengan memperkuat penggunaan mata uang lokal dan menciptakan sistem pembayaran alternatif, yang diharapkan dapat membentuk sistem keuangan internasional yang lebih adil dan multipolar. Strategi ini juga merupakan respons terhadap tekanan geopolitik, seperti sanksi yang dikenakan oleh Barat terhadap Rusia, yang mempercepat upaya negara-negara BRICS untuk bertransaksi di luar dolar AS. Upaya ini belum sepenuhnya menggantikan dominasi dolar, namun telah

memperlihatkan kemajuan signifikan dan menjadi tantangan nyata terhadap hegemoni dolar dalam tatanan ekonomi global saat ini.

Upaya mengurangi hegemoni dolar ini dapat memberikan kesempatan untuk negara-negara terutama di *Global South* agar dapat meningkatkan kedaulatan ekonomi dan menghindari risiko manipulasi ekonomi serta tekanan politik yang sering terjadi akibat dominasi mata uang tunggal. Hal ini membuka peluang bagi keseimbangan ekonomi dan politik yang lebih adil di tingkat global, mengurangi ketimpangan ekonomi dan politik yang lebih adil di tingkat global, serta memperkuat kemandirian negara-negara dalam mengelola kebijakan moneter dan perdagangan internasional mereka.

Aksi dedolarisasi yang dilakukan oleh negara-negara BRICS tidak hanya memiliki dimensi ekonomi semata, tetapi juga memiliki relevansi mendalam dengan nilai masalah dalam Islam. Dedolarisasi bertujuan mengurangi dominasi mata uang dolar Amerika Serikat yang selama ini mendominasi sistem keuangan global, sehingga menciptakan sistem moneter internasional yang lebih adil dan multipolar. Menurut (Hananto & Astuti, 2025) upaya ini tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi dan stabilitas keuangan domestik masing-masing negara, tetapi juga mempromosikan kemaslahatan yang lebih luas dalam tatanan sosial dan politik global. Strategi dedolarisasi BRICS memperkuat solidaritas dan kerja sama antarnegara anggota, yang berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap satu kekuatan hegemon ekonomi, sehingga menciptakan kestabilan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip masalah yaitu menjaga kemaslahatan umum, menghilangkan kemudharatan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, nilai kemaslahatan Islam menjadi basis penting dalam menganalisis strategi dedolarisasi yang tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik terkait kedaulatan dan keadilan global.

Maslahah adalah konsep yang merujuk pada kemaslahatan umat yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam. Secara ringkas, masalah dapat

dipahami sebagai upaya untuk meraih manfaat yang baik bagi manusia sekaligus menghindarkan mereka dari kemudharatan atau mafsadah. Konsep ini menitikberatkan pada menjaga tujuan-tujuan syariat yang bersifat fundamental untuk keberlangsungan kehidupan umat, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Amri, 2018). Dalam konteks ini, masalah tidak hanya bersifat individu, tetapi juga membawa manfaat kolektif bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, masalah merupakan nilai yang mengedepankan kebaikan bersama dan keberlanjutan hidup bermasyarakat dengan menjauhi segala bentuk kerugian atau bahaya. Oleh karena itu, ia menjadi asas dalam menetapkan berbagai hukum dan kebijakan yang dapat melindungi kepentingan umat dan memelihara tatanan sosial secara adil dan harmonis. Lebih jauh lagi, masalah berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan aturan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'at. Dengan demikian, masalah menjadi fondasi penting dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan umat dan aspirasi syariat, sehingga selalu mengarahkan pada kemaslahatan dan kebaikan kolektif yang berkelanjutan.

Prinsip masalah yang menekankan pada tercapainya manfaat dan tercegahnya mafsadah sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Hal ini ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menekankan pentingnya keadilan, kebermanfaatan, serta rahmat bagi seluruh umat manusia. Salah satunya terdapat pada QS. Al-Anbiya ayat 107, surah ini menegaskan bahwa kebijakan yang membawa kemaslahatan sejalan dengan misi rahmat Islam.

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. Al-Anbiya ayat 107)

Nilai masalah inilah yang menjadi bingkai dalam membaca setiap kebijakan dedolarisasi BRICS. Oleh karena itu, penting untuk meninjau masing-masing strategi BRICS dan melihat bagaimana ia berkelindan dengan dimensi-dimensi masalah, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun hukum.

5.2.1. Relevansi *Local Currency Settlement (LCS)* dengan Nilai Masalah

Strategi pertama adalah *Local Currency Settlement (LCS)*, pada hakikatnya adalah upaya negara-negara BRICS untuk memperkuat transaksi perdagangan dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing, tanpa harus bergantung pada dolar AS. Inisiatif ini bukan sekadar strategi teknis dalam sistem keuangan global, melainkan mencerminkan langkah kolektif untuk menciptakan kemandirian ekonomi, mengurangi biaya transaksi, serta melindungi stabilitas pasar domestik. Dari sudut pandang kemaslahatan, langkah ini berfungsi untuk menjaga kepentingan publik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Dari sisi ekonomi, penggunaan mata uang lokal mengurangi biaya konversi ganda yang selama ini membebani pelaku usaha. Hal ini memberi dampak positif terutama bagi sektor usaha kecil dan menengah agar lebih mudah terlibat dalam perdagangan internasional. Relevansi dengan nilai kemaslahatan adalah terciptanya akses ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Al-Qur'an menegaskan pentingnya distribusi ekonomi yang adil dalam QS. Al-Hasyr ayat 7.

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr 59:7)"

Dengan kata lain, LCS menjadi instrumen kebijakan yang mendukung distribusi kekayaan lebih luas, bukan hanya terkonsentrasi di segelintir negara besar pemegang dolar. Dari sisi sosial, LCS membuka peluang bagi masyarakat negara anggota untuk memperoleh stabilitas harga barang impor maupun ekspor. Ketika fluktuasi dolar dapat ditekan, risiko inflasi yang merugikan masyarakat luas pun dapat diminimalisasi. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga kemaslahatan umat yang ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad: *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain."* Dengan demikian, keberadaan LCS tidak hanya memberi keuntungan bagi elite ekonomi, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat.

Dari sisi politik, inisiatif LCS memperlihatkan adanya solidaritas negara-negara berkembang dalam melawan dominasi dolar AS yang selama ini dianggap menimbulkan ketidakadilan global. Langkah ini mencerminkan sikap saling

menolong dalam kebaikan dan solidaritas, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2.

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Maidah 5:2)

LCS dengan demikian bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga simbol persatuan politik negara-negara yang ingin menegakkan sistem global yang lebih adil. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, ketika perdagangan internasional hampir sepenuhnya didominasi oleh dolar AS, LCS menawarkan alternatif yang lebih seimbang dan bermanfaat. Dominasi dolar menciptakan kerentanan global terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat, sehingga negara lain sering menanggung kerugian akibat keputusan unilateral yang tidak memperhatikan kepentingan bersama. Dengan adanya LCS, negara-negara memiliki ruang untuk melindungi kedaulatan ekonominya. Perubahan ini sesuai dengan prinsip dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 yang menyebutkan bahwa umat Islam adalah *“ummatan wasathan”* (umat pertengahan) yang menegakkan keadilan dan keseimbangan. Maka, LCS dapat dipandang sebagai langkah menuju sistem perdagangan internasional yang lebih berimbang.

Pada akhirnya, relevansi LCS dengan nilai kemaslahatan adalah terwujudnya manfaat kolektif: efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Aspek-aspek ini berorientasi pada upaya menghindari kerugian (mafsadah) akibat ketergantungan berlebihan pada dolar AS, sekaligus menghadirkan manfaat (maslahah) berupa stabilitas dan kemandirian. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis Nabi: *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”* (HR. Ibnu Majah). Dengan demikian, LCS sebagai strategi BRICS tidak hanya penting secara geopolitik, tetapi juga sejalan dengan nilai kemaslahatan yang mengutamakan manfaat bersama di atas kepentingan segelintir pihak.

5.2.2. Relevansi *New Development Bank (NDB)* dengan Nilai Masalah

New Development Bank (NDB) merupakan instrumen strategis BRICS dalam menyediakan pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang lebih adil, terutama bagi negara-negara berkembang. Jika sebelum berdirinya NDB akses pembiayaan global cenderung didominasi lembaga keuangan Barat seperti IMF dan World Bank yang sering menempatkan negara berkembang pada posisi subordinat, maka kehadiran NDB menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan setara. Perubahan ini membawa nilai masalah ekonomi, karena mampu memperluas akses modal untuk pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, dan penguatan kapasitas negara berkembang tanpa ketergantungan penuh pada dolar.

Dari sisi masalah sosial, keberadaan NDB memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pembiayaan proyek transportasi, air bersih, sanitasi, perumahan, dan sekolah. Dampak ini secara nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial yang sebelumnya sulit diatasi akibat keterbatasan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7.

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr 59:7)

Ayat ini menekankan prinsip keadilan distribusi kekayaan, sehingga manfaat ekonomi tidak boleh hanya terakumulasi pada kelompok tertentu. Dengan prinsip tersebut, kehadiran NDB dapat dipahami sebagai upaya konkret untuk mewujudkan peredaran manfaat yang lebih luas. Melalui pembiayaan proyek infrastruktur dasar dan layanan publik, lembaga ini membantu negara berkembang memastikan bahwa pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah, bukan hanya oleh kelompok elite. Dengan demikian, NDB berfungsi sebagai instrumen pemerataan yang selaras dengan nilai kemaslahatan sosial, yakni menghadirkan akses yang setara bagi masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.

Sama halnya dengan LCS, pada perspektif masalah politik, NDB menjadi simbol solidaritas negara-negara Selatan untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam tatanan global. Jika sebelumnya negara berkembang sering berada pada posisi pasif dalam sistem keuangan internasional, kini mereka memiliki instrumen untuk menegosiasikan kepentingan kolektif. Prinsip saling menolong ini sejalan dengan QS. Al-Maidah ayat 2.

Dari sisi masalah hukum, NDB menyediakan mekanisme pembiayaan yang lebih transparan dan adil dibanding sistem lama yang sarat dengan syarat politik dan intervensi. Mekanisme ini menutup celah ketidakadilan dalam kontrak pinjaman dan meminimalisasi risiko eksploitasi. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 29.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa 4:29).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat semangat kemaslahatan ini:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.” (HR. Ahmad)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

Kedua hadis ini menekankan bahwa keberadaan lembaga seperti NDB bernilai maslahat karena membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Tak hanya itu, hadis ini juga menegaskan bahwa sistem keuangan global yang menindas negara berkembang perlu diganti dengan mekanisme yang lebih adil, seperti yang ditawarkan oleh NDB. Jika ditinjau secara komparatif, kondisi sebelum NDB menunjukkan dominasi tunggal lembaga Barat, akses terbatas bagi negara berkembang, serta risiko ketergantungan pada dolar. Sedangkan sesudah NDB berdiri, terlihat adanya jalur alternatif pembiayaan, pengakuan internasional lebih luas, dan penguatan solidaritas antarnegara berkembang. Pergeseran ini menunjukkan implementasi nyata nilai kemaslahatan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

5.2.3. Relevansi *Contingent Reserves Arrangement (CRA)* dengan Nilai Masalah

Contingent Reserve Arrangement (CRA) adalah mekanisme pendanaan yang dibentuk BRICS untuk menyediakan likuiditas darurat dan mencegah krisis keuangan jangka pendek. Tujuan utamanya adalah melindungi stabilitas ekonomi anggota BRICS, mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan IMF, serta memperkuat solidaritas negara berkembang. CRA memberikan akses cepat ke likuiditas ketika negara anggota mengalami tekanan keuangan. Hal ini mengurangi risiko runtuhnya ekonomi domestik akibat ketergantungan pada lembaga keuangan global seperti IMF yang sering menetapkan syarat ketat.

Dengan adanya CRA, memberikan dampak untuk memperkuat kemandirian finansial negara berkembang dan melindungi masyarakat dari gejolak harga, inflasi, dan resesi. Berbeda dengan IMF yang sering dianggap menekan negara berkembang melalui syarat pinjaman, CRA bersifat lebih fleksibel dan kolektif. Hal ini sejalan dengan HR. Muslim:

“Barang siapa melepaskan satu kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan di hari kiamat...” HR. Muslim

Hadis ini mencerminkan dukungan dan semangat CRA dalam membantu para anggota BRICS yang sedang mengalami krisis keuangan. Stabilitas ekonomi yang dijaga CRA berdampak langsung pada masyarakat, karena krisis keuangan sering berujung pada pengangguran, kemiskinan, dan melemahnya pelayanan publik. Dengan CRA, BRICS berusaha melindungi masyarakat dari efek sosial krisis ekonomi global. CRA juga dianggap sebagai upaya untuk memperkuat solidaritas politik antarnegara BRICS dengan menghadirkan alternatif dari dominasi lembaga keuangan Barat. Hal ini mencerminkan upaya negara berkembang untuk memiliki kemandirian politik dalam mengambil keputusan keuangan. Dengan membangun mekanisme sendiri, BRICS menghadirkan alternatif hukum internasional dalam sistem keuangan global. CRA menawarkan sistem pinjaman berbasis kesepakatan antarnegara yang lebih adil dan tidak menjerat negara peminjam dengan syarat berlebihan.

Pada analisis komparatif, sebelum adanya CRA, negara berkembang hanya bisa bergantung pada IMF atau World Bank yang sering kali harus menerima syarat berat seperti pemotongan subsidi, privatisasi aset negara, dan reformasi ekonomi yang merugikan masyarakat. Dengan hadirnya CRA, negara anggota BRICS memiliki jaring pengaman alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, lebih fleksibel, dan memperkuat solidaritas global Selatan. Maka, dari sini dinilai kemaslahatan yang muncul berupa kemandirian ekonomi, keadilan politik, kesejahteraan sosial, serta kepastian hukum dalam kerja sama internasional.

5.2.4. Relevansi *Cross-border International Payment System (CIPS)* dengan Nilai Masalah

Dalam perspektif kemaslahatan, strategi dedolarisasi melalui CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) merupakan jawaban atas risiko monopoli keuangan global yang sebelumnya sangat bergantung pada SWIFT. SWIFT memang telah lama menjadi standar internasional, tetapi dominasi Barat terhadap sistem ini sering menjadikannya instrumen sanksi politik. Dari sudut pandang kemaslahatan, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian luas yang menyalahi prinsip keadilan. CIPS hadir sebagai alternatif yang lebih mandiri, efisien, dan aman. Keberadaannya mengurangi biaya transaksi lintas batas, mempercepat penyelesaian pembayaran, sekaligus melindungi negara-negara mitra dari risiko geopolitik. Nilai kemaslahatan ekonomi di sini adalah terciptanya keadilan dalam distribusi manfaat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188.

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2:188)

Ayat ini menegaskan pentingnya sistem transaksi yang adil dan terbebas dari segala bentuk penyalahgunaan, baik dalam skala individu maupun institusi. Ketika praktik transaksi dilakukan dengan cara yang batil, seperti monopoli, manipulasi, atau pemaksaan, maka yang dirugikan bukan hanya pihak tertentu tetapi juga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, keberadaan sistem

pembayaran internasional seperti CIPS dapat dipahami sebagai ikhtiar untuk mewujudkan transaksi yang lebih transparan, jujur, dan setara. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur transaksi pada level personal, tetapi juga memberi prinsip dasar bagi sistem ekonomi global agar terhindar dari praktik ketidakadilan dan dominasi sepihak.

Dari aspek sosial, CIPS memperluas akses bagi negara berkembang untuk masuk dalam perdagangan global tanpa harus terlalu bergantung pada dolar AS. Hal ini berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di banyak kawasan. Nilai ini sejalan dengan QS. Al-Qashash ayat 77.

“...Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia; dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu...” (QS. Al-Qashash 28:77)

Ayat ini mendorong agar pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi membawa kebaikan sosial yang lebih luas. Dari sisi politik, CIPS menjadi sarana penguatan kemandirian negara-negara BRICS dan sekutunya. Jika SWIFT dapat dipolitisasi untuk menekan negara tertentu, CIPS menawarkan jalur alternatif yang lebih netral. Hal ini memperkuat kerja sama internasional yang adil dan saling menguntungkan. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

“...Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa...” (QS. Al-Hujurat 49:13)

Ayat ini yang menekankan kesetaraan antarbangsa, bukan dominasi satu kelompok atas yang lain. Dari aspek hukum dan regulasi, keberadaan CIPS membantu menciptakan sistem pembayaran dengan kepastian hukum yang lebih jelas, efisien, dan terbuka untuk mitra global. Nilai keadilan hukum ini sesuai dengan QS. Asy-Syura ayat 38.

“...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...” (QS. Asy-Syura 42:38)

Potongan ayat ini memberikan landasan bahwa sistem hukum dan regulasi sebaiknya lahir dari kesepakatan bersama, bukan paksaan sepihak. Secara komparatif, SWIFT memang unggul dari sisi jangkauan global dan tradisi kepercayaan, tetapi memiliki risiko dominasi geopolitik yang sering dimanfaatkan sebagai alat politik. Sementara itu, CIPS menawarkan alternatif yang lebih mandiri, efisien, dan berpotensi adil, walaupun masih menghadapi tantangan kepercayaan dan regulasi. Dalam konteks masalah, pilihan atas sistem yang lebih melindungi dan memberi manfaat luas jelas lebih utama. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW: *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”* (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menegaskan prinsip bahwa sistem global seharusnya menghindari praktik yang merugikan pihak tertentu.

5.2.5. Relevansi *Belt and Road Initiative (BRI)* dengan Nilai Masalah

Inisiatif Sabuk dan Jalan (*Belt and Road Initiative/BRI*) merupakan strategi pembangunan global yang menekankan konektivitas lintas negara melalui pembangunan infrastruktur darat dan laut, investasi, perdagangan, dan kerja sama kebijakan. Inti dari BRI bukan sekadar memperkuat posisi ekonomi Tiongkok, melainkan juga mendorong keterhubungan antarbangsa yang berdampak pada penguatan arus perdagangan, integrasi finansial, dan pertukaran sosial budaya. Dengan demikian, BRI dapat dipandang sebagai instrumen yang membuka peluang kemaslahatan lebih luas, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam kerangka pembangunan internasional, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun ketidakadilan sosial. Sejarah mencatat bahwa industrialisasi dan perdagangan global kerap meninggalkan dampak negatif seperti eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, hingga ketimpangan kesejahteraan. Karena itu, pembangunan lintas batas melalui BRI harus diarahkan bukan hanya untuk memperkuat konektivitas dan perdagangan, tetapi juga untuk menghadirkan keberlanjutan yang membawa maslahat bagi manusia dan alam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 41.

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum ayat 41)

Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut adalah akibat dari perbuatan manusia, baik melalui eksploitasi berlebihan, perdagangan yang tidak adil, maupun pembangunan yang abai terhadap keseimbangan alam. Dengan kata lain, setiap aktivitas ekonomi termasuk proyek-proyek BRI harus dirancang agar tidak mengulangi kesalahan serupa. BRI dapat membawa masalah besar apabila dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan, distribusi manfaat yang adil, dan prinsip kerja sama yang tidak merugikan salah satu pihak.

Dari segi ekonomi, BRI membuka akses terhadap pembangunan infrastruktur strategis seperti jalur kereta, pelabuhan, dan energi yang mampu menekan biaya logistik dan mempercepat perdagangan antarnegara. Kondisi sebelum BRI ditandai oleh keterbatasan konektivitas, yang menimbulkan biaya tinggi dan mempersempit arus perdagangan. Setelah implementasi BRI, peluang ekonomi lebih merata, terutama bagi negara-negara berkembang yang sebelumnya terisolasi dari arus perdagangan global. Hal ini mencerminkan kemaslahatan ekonomi, yaitu menghadirkan manfaat kolektif dan mengurangi kesenjangan. Adapun hadis dari HR.Tirmidzi mendukung pernyataan ini dengan menekankan nilai keadilan dan keberkahan dalam aktivitas perdagangan lintas negara.

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi)

Di sisi sosial, pembangunan infrastruktur seperti jalan, energi, dan jaringan digital mendorong terbukanya lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan, serta pertukaran budaya antarbangsa. Sebelum adanya BRI, banyak masyarakat di kawasan Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika Timur mengalami hambatan mobilitas dan keterbatasan fasilitas publik. Kini, konektivitas yang lebih luas mendukung pertemuan antarbangsa, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemaslahatan sosial ini sejalan dengan nilai Islam

yang mendorong terjalinnya ukhuwah lintas batas geografis. Tercermin dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.” (QS. Al-Hujurat 49:13)

Dalam aspek politik, BRI memperkuat posisi negara-negara berkembang agar tidak sepenuhnya bergantung pada dominasi negara adidaya tertentu. Sebelum adanya alternatif BRI, banyak negara hanya memiliki pilihan terbatas dalam kerja sama pembangunan dan pendanaan. Dengan adanya BRI, keseimbangan baru tercipta, memungkinkan negara-negara peserta memperoleh kemandirian relatif dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan politik, yaitu mengurangi ketidakadilan global dan memperkuat kerja sama yang lebih setara. Adapun hadis HR. Bukhari & Muslim menegaskan pentingnya solidaritas antarnegara.

“Seorang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan.” HR. Bukhari & Muslim

Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum BRI, di mana akses infrastruktur dan keuangan global terbatas, kehadiran BRI membawa manfaat nyata dalam bentuk konektivitas yang lebih luas, peluang perdagangan, dan solidaritas antarnegara. Meskipun terdapat tantangan seperti risiko utang atau dominasi Tiongkok, peluang kemaslahatan yang lahir darinya jauh lebih besar bila dikelola dengan prinsip keadilan dan transparansi. Dengan demikian, BRI dapat dilihat sebagai contoh implementasi nilai kemaslahatan yang menghubungkan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan sosial, memperkuat posisi politik negara-negara berkembang, sekaligus membangun kerangka hukum internasional yang lebih setara.

5.2.6. Relevansi Multiple CBDC Bridge (mBridge) dengan Nilai Masalah

mBridge merupakan platform multi-CBDC lintas batas yang dikembangkan untuk mempercepat transaksi internasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi serta keamanan. Proyek ini berusaha menghadirkan

alternatif dari sistem pembayaran tradisional yang didominasi oleh SWIFT dan berorientasi pada dolar AS. Dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan berbasis kerja sama antarbank sentral, mBridge diharapkan mampu menghadirkan sistem keuangan global yang lebih inklusif dan adil.

Dengan memangkas biaya transaksi dan mempercepat proses pembayaran lintas negara, mBridge memberikan manfaat nyata bagi stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional. Hal ini menciptakan efisiensi serta mengurangi beban finansial masyarakat dan pelaku usaha. Prinsip ini selaras dengan nilai kemaslahatan di sisi ekonomi dan dianggap sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya perdagangan yang adil, efisien, dan tidak merugikan pihak mana pun. Al-Qur'an menegaskan secara jelas mengenai hal ini dalam firman Allah:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah 2:275).

Ayat ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi yang dibangun di atas transaksi halal dan bebas dari praktik eksploitatif seperti riba merupakan jalan untuk menciptakan keberkahan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain, sistem yang mendorong transaksi yang efisien, transparan, dan saling menguntungkan merupakan bagian dari nilai kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip Islam.

Inklusivitas keuangan yang ditawarkan mBridge memperluas akses masyarakat untuk terlibat dalam sistem pembayaran global. Hal ini mendukung pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antarnegara. Nilai kemaslahatan sosial ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya membantu sesama agar keluar dari kesulitan hidup, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Rasulullah bersabda: *“Barangsiapa melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat”* (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa upaya memberikan kemudahan dan melapangkan jalan bagi orang lain termasuk melalui akses terhadap sistem keuangan yang adil dan inklusif dipandang sebagai amal yang sangat bernilai di sisi Allah. Dalam konteks mBridge, inklusivitas keuangan dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari melapangkan kesusahan, karena masyarakat dan negara yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem pembayaran global kini memiliki peluang yang lebih luas untuk ikut serta dalam aktivitas ekonomi internasional tanpa dibebani biaya tinggi atau hambatan struktural.

Pada masalah yang berhubungan dengan politik, dengan adanya alternatif terhadap SWIFT ini, mBridge mengurangi ketergantungan pada instrumen yang kerap dipolitisasi oleh negara besar. Hal ini memberi ruang bagi negara berkembang untuk menjaga kemandirian politik dan ekonomi. Prinsip kemandirian ini sejalan dengan nilai Islam yang menekankan pentingnya hubungan antarbangsa yang adil dan setara. Hal tersebut tercermin dalam firman Allah SWT:

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat 49:13)

Ayat ini memberikan penegasan bahwa perbedaan bangsa dan negara bukanlah alasan untuk dominasi atau hegemoni, melainkan untuk membangun interaksi yang saling menghormati. Dalam konteks mBridge, semangat ini tercermin pada upaya menciptakan sistem keuangan global yang tidak dimonopoli oleh satu negara atau blok tertentu, melainkan menjadi ruang kolaborasi yang adil.

Jika dibandingkan dengan sistem SWIFT yang memakan waktu 3–5 hari, berbiaya tinggi, dan rentan dipolitisasi, mBridge menghadirkan solusi nyata: transaksi hanya memakan hitungan detik, dengan biaya lebih rendah, serta tidak bergantung pada satu negara atau blok tertentu. Hal ini menciptakan pergeseran dari sistem lama yang menimbulkan mafsadah (kerugian ekonomi dan

ketidakadilan politik) menuju sistem baru yang lebih maslahat, adil, dan berdaya guna bagi masyarakat global.

Uraian di atas memperlihatkan bagaimana setiap strategi dedolarisasi BRICS membawa nilai kemaslahatan yang berbeda-beda sesuai dengan ranahnya, baik sosial, ekonomi, politik, maupun hukum. Agar keterkaitan tersebut lebih jelas terlihat secara menyeluruh, hubungan antara strategi dan nilai kemaslahatan dapat ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.2 Relevansi Nilai Masalah Dalam Aksi Dedolarisasi BRICS

Strategi BRICS	Bidang Masalah	Relevansi dan Manfaat
<i>Local Currency Settlement (LCS)</i>	Ekonomi, sosial, politik	Mengurangi biaya konversi, mendukung UMKM di pasar internasional, distribusi kekayaan lebih merata. Menjaga stabilitas harga, menekan inflasi. Mewujudkan solidaritas negara berkembang, simbol persatuan politik, melindungi kedaulatan ekonomi.
<i>New Development Bank (NDB)</i>	Ekonomi, sosial, politik, hukum	Mampu memperluas akses modal untuk pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, dan penguatan kapasitas negara berkembang. Memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pembiayaan proyek transportasi, air bersih, sanitasi, perumahan, dan sekolah. Menjadi simbol solidaritas negara-negara Selatan untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam tatanan global. Menyediakan

		mekanisme pembiayaan yang lebih transparan dan adil dibanding sistem lama yang sarat dengan syarat politik dan intervensi.
<i>Contingent Reserves Arrangement (CRA)</i>	Ekonomi, sosial, politik	Melindungi stabilitas ekonomi anggota BRICS, mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan IMF, memberikan akses cepat ke likuiditas ketika negara anggota mengalami tekanan keuangan, Melindungi masyarakat dari gejolak harga, inflasi, dan resesi. Memperkuat solidaritas politik antarnegara BRICS dengan menghadirkan alternatif dari dominasi lembaga keuangan Barat
<i>Cross-border International Payment System (CIPS)</i>	Ekonomi, sosial, politik, hukum	CIPS dapat dipahami sebagai ikhtiar untuk mewujudkan transaksi yang lebih transparan, jujur, dan setara. CIPS memperluas akses bagi negara berkembang untuk masuk dalam perdagangan global tanpa harus terlalu bergantung pada dolar AS. CIPS menawarkan jalur alternatif yang lebih netral. Keberadaan CIPS membantu menciptakan sistem pembayaran dengan kepastian hukum yang lebih jelas, efisien, dan terbuka untuk mitra global.
<i>Belt and Road Initiative (BRI)</i>	Ekonomi, sosial, politik	BRI membuka akses terhadap pembangunan

		infrastruktur strategis seperti jalur kereta, pelabuhan, dan energi yang mampu menekan biaya logistik dan mempercepat perdagangan antarnegara. Pembangunan infrastruktur mendorong terbukanya lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan, serta pertukaran budaya antarbangsa. BRI memperkuat posisi negara-negara berkembang agar tidak sepenuhnya bergantung pada dominasi negara adidaya tertentu.
<i>Multiple CBDC Bridge (mBridge)</i>	Ekonomi, sosial, politik	menciptakan efisiensi serta mengurangi beban finansial masyarakat dan pelaku usaha. Inklusivitas keuangan yang ditawarkan mBridge memperluas akses masyarakat untuk terlibat dalam sistem pembayaran global. Dengan adanya alternatif terhadap SWIFT ini, mBridge mengurangi ketergantungan pada instrumen yang kerap dipolitisasi oleh negara besar

5.3. Pengaruh Dedolarisasi BRICS Terhadap Perekonomian Indonesia

Dedolarisasi adalah proses mengurangi atau menggantikan penggunaan dolar Amerika Serikat (USD) dalam perdagangan internasional, cadangan devisa, dan transaksi ekonomi, baik dengan menggunakan mata uang lokal, mata uang alternatif lain, atau instrumen keuangan alternatif. Tujuannya adalah agar negara-

negara tidak terlalu bergantung pada dolar AS sebagai alat pembayaran dan penyimpanan nilai dalam sistem keuangan global. BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Afrika) telah melakukan aksi ini sejak pembentukannya di tahun 2009 dimana pada saat itu Afrika Selatan baru bergabung di tahun 2010. Sejak dibentuk, aliansi ini terus memperkuat posisinya sebagai poros alternatif dalam tatanan ekonomi global. BRICS bukan hanya forum kerjasama antarnegara berkembang terbesar dunia, tetapi juga simbol perlawanan terhadap dominasi moneter Barat, terutama dalam menghadapi hegemoni dolar Amerika Serikat.

Seiring dengan meningkatnya pengaruh ekonomi dan geopolitik, BRICS mulai membuka diri bagi negara-negara lain yang ingin bergabung. Ekspansi ini merupakan bagian dari visi multipolaritas dunia, yang tidak lagi bertumpu pada negara-negara G7. Inisiatif ini secara resmi dimulai dalam KTT BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Agustus 2023, yang menandai langkah besar dalam memperluas keanggotaan. Menurut halaman resmi BRICS dalam laporannya *The Diplomat, 2023; BRICS Summit Johannesburg Declaration*, dalam KTT tersebut, diumumkan bahwa enam negara tambahan secara resmi diundang dan diterima sebagai anggota baru per 1 Januari 2024, yang terdiri dari Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (EUA). Dengan bergabungnya negara-negara tersebut, BRICS memperluas cakupannya melintasi tiga benua: Asia, Afrika, dan Amerika Latin, menciptakan blok ekonomi dan politik yang menguasai sekitar 45% populasi global dan lebih dari 30% PDB dunia jika dihitung berdasarkan PPP.

Kemudian pada tanggal 6 Januari 2025, Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS, menandai langkah strategis penting dalam memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitik kelompok ini. Indonesia sejak lama telah disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk bergabung dengan BRICS. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor strategis seperti status Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, posisi geostrategis dalam jalur perdagangan Indo-Pasifik, dan kontribusi aktif dalam forum multilateral seperti G20 dan ASEAN. Presiden Joko Widodo dalam

berbagai kesempatan menyatakan bahwa Indonesia mendukung tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang, sejalan dengan visi BRICS. Diskusi intensif mengenai keanggotaan Indonesia telah terjadi sejak 2022, dan semakin menguat dalam forum internasional.

Pada KTT BRICS ke-16 yang berlangsung di Kazan, Rusia, Indonesia secara resmi diumumkan bergabung sebagai anggota BRICS pada 6 Januari 2025. Setelah proses penerimaannya sempat tertunda karena pemilihan umum nasional pada 2024 lalu. Keputusan ini diumumkan setelah melewati proses diplomasi dan pertimbangan geopolitik. Selain penambahan anggota penuh, BRICS juga memperkenalkan kategori negara mitra pada awal 2025. Negara-negara yang diterima antara lain Belarus, Bolivia, Kazakstan, Kuba, Malaysia, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan.

Bergabungnya Indonesia memungkinkan untuk memperluas hubungan perdagangan dan investasi, tidak hanya tergantung pada mitra Barat (AS, Uni Eropa), tapi juga dengan kekuatan ekonomi seperti China, India, dan Rusia. Menurut halaman resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan, ekspor Indonesia ke AS mengalami tantangan akibat kebijakan proteksionis yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump, termasuk tarif impor tambahan sebesar 10-20% pada barang dari Indonesia. Sementara ekspor ke Uni Eropa tetap stabil, dengan fokus pada produk seperti minyak kelapa sawit dan tekstil. Namun, regulasi lingkungan Uni Eropa menjadi tantangan bagi beberapa komoditas. Berdasarkan siaran pers Bank Indonesia yang dipublikasikan pada 17 Februari 2025, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2025 mencatat surplus sebesar USD\$3,45 miliar, meningkat dibandingkan dengan surplus pada Desember 2024 sebesar USD\$ 2,24 miliar. Peningkatan surplus ini dianggap positif untuk menompang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut. Surplus neraca perdagangan yang lebih tinggi terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat, dimana pada Januari 2025 mencatat surplus sebesar USD\$4,88 miliar, seiring dengan tetap kuatnya ekspor nonmigas yang mencapai USD\$20,40 miliar.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke China, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia. Defisit neraca perdagangan migas tercatat menurun menjadi USD\$1,43 miliar pada Januari 2025.

Saat ini, Indonesia telah melakukan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dengan negara-negara anggota BRICS yaitu Rusia,, Uni Emirat Arab (UEA) dan Iran. BIT merupakan perjanjian Internasional yang dilakukan oleh dua negara dan mengikat keduanya. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Bidang Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tirta Nugrama Mursitama menyatakan lima negara pendiri BRICS telah memiliki investasi langsung terbesar di Indonesia. selama periode 2021-2024, investasi China berfokus pada industri logam dasar, barang logam, mesin, bukan mesin. Nilai FDI China di Indonesia meningkat pada 2022 menjadi USD\$8,2 miliar. Sementara itu, FDI India di Indonesia dipusatkan pada sektor hotel dan restoran. Rusia pada sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Uni Emirat Arab pada listrik, gas, dan air, serta Afrika Selatan pada perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Secara keseluruhan, nilai FDI negara-negara BRICS di Indonesia pada 2021 adalah USD\$3,2 miliar atau 10,47% dari total FDI di Indonesia. Nilai FDI ini merangkak naik pada 2022 menjadi USD\$8,42 miliar, dan turun di tahun 2023 menjadi USD\$7,92 miliar. Sedangkan di kuartal pertama dan kedua tahun 2024, nilai FDI negara-negara BRICS mencapai USD\$4,14 miliar atau 14,72% dari total FDI di Indonesia. Hingga saat ini, Bank Indonesia telah mengajak investor global untuk berinvestasi di Indonesia, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 4,7-5,5% hal ini disampaikan pada siaran pers yang dipublikasikan oleh halaman resmi Bank Indonesia pada 24 Januari 2025 lalu.

BRICS tengah mendorong dedolarisasi melalui penggunaan mata uang lokal, dan Indonesia sudah memulai langkah ini lewat skema *Local Currency Settlement* (LCS) dengan China, Jepang, dan Malaysia. Dengan bergabung, Indonesia memperkuat ketahanan ekonominya terhadap fluktuasi dolar AS.

Bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik 2025, total perdagangan Indonesia dengan China tercatat sebesar USD\$64,94 miliar pada tahun 2025, sementara total perdagangan Indonesia dengan Jepang mencapai USD\$20,78 miliar, dengan peningkatan transaksi menggunakan LCS, dan total perdagangan bilateral dengan Malaysia mencapai USD\$12,46 miliar, dengan sebagian transaksi dilakukan menggunakan mata uang lokal. Pertumbuhan LCS Indonesia dengan Jepang meningkat signifikan dari 9,8 juta USD per bulan pada 2020 menjadi 109,4 juta USD per bulan pada 2021. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat peningkatan penggunaan LCS dalam perdagangan dengan China dan Malaysia, namun angka spesifik belum tersedia.

Keanggotaan BRICS membuka akses Indonesia terhadap *New Development Bank* (NDB) yang dapat mendukung proyek infrastruktur strategis nasional, sebagai alternatif dari lembaga keuangan Barat seperti IMF atau *World Bank*. NDB dapat memberikan pendanaan untuk proyek transportasi dan energi, termasuk pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik. Fokus utamanya adalah meningkatkan konektivitas dan akses energi di Indonesia. NDB mendukung proyek energi bersih, seperti pengembangan tenaga surya dan hidro, bank ini juga berkontribusi dalam proyek perlindungan lingkungan dan sanitasi. NDB menyediakan pinjaman dan investasi ekuitas untuk berbagai proyek di Indonesia, sektor teknologi dan digital juga mendapatkan perhatian khusus dari NDB. Bergabung dengan NDB memberikan Indonesia peluang akses ke sumber pembiayaan alternatif selain *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB), hal ini tentu membantu mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan Barat. Dikarenakan masih dalam tahap awal keanggotaan, Indonesia sendiri memiliki 77 proyek pembangunan prioritas yang sejalan dengan tujuan NDB, disebutkan oleh Presiden NDB, Dilma Rousseff. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah pinjaman atau bantuan yang spesifik yang telah diterima Indonesia dari NDB. Kemungkinan hal ini dikarenakan masih dalam proses negosiasi untuk mendapatkan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Dengan dedolarisasi, Indonesia terbantu dalam mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, sehingga memperkuat kedaulatan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini penting untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang selama ini dipengaruhi fluktuasi dolar dan kebijakan moneter AS. Tak hanya itu, dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia juga dapat mengurangi dampak intervensi kebijakan AS, seperti sanksi ekonomi dan tekanan politik yang selama ini didominasi dolar sebagai alat hegemoninya. Ini memberikan Indonesia ruang ekonomi dan politik yang lebih besar. Bergabung dengan BRICS juga membuka akses ke sistem keuangan yang lebih beragam dan mengurangi risiko ketergantungan pada sistem keuangan Barat, serta memberikan posisi strategis sebagai mediator antara negara-negara BRICS dan kawasan Timur Tengah, serta sebagai pilar penting dalam mengimbangi dominasi ekonomi Barat, dan memperkuat posisi diplomasi ekonomi Indonesia di kancah global. Ringkasan mengenai pengaruh dedolarisasi BRICS terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat pada tabel 5.3.

**Tabel 5.3 Pengaruh Dedolarisasi BRICS Terhadap Perekonomian
Indonesia**

No	Aspek Ekonomi	Pengaruh	Data dan Sumber
1	Perdagangan Internasional	Ekspor nonmigas meningkat (Januari 2025: USD\$20,40 miliar)	Siaran pers, Bank Indonesia, 17 Februari 2025
2	Nilai Tukar dan Devisa	Peningkatan transaksi LCS (China, Jepang, Malaysia) mengurangi tekanan dolar	BPS 2025, BI 2025
3	Investasi Asing	FDI BRICS 2021-2024 meningkat: dari USD\$3,2 miliar menjadi USD\$8,42 miliar	BKPM, 2024
4	Infrastruktur dan Energi	Akses pendanaan dari NDB untuk proyek transportasi, energi, dan teknologi	Pernyataan Presiden NDB Dilma Rousseff
5	Stabilitas Ekonomi Nasional	Surplus neraca perdagangan Januari 2025: USD\$3,45 miliar (naik dari USD\$2,24 miliar di Desember 2024)	BI Press Release 2025